

Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an
(Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Muhammad muis

NIM: 161410569



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhammad Muis**
NIM : **161410569**
Jurusan : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**
Fakultas : **Ushuluddin**
Judul Skripsi : **Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an**
(Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri, Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2020

Yang Membuat Pernyataan.

Muhammad Muis

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi

Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an

(Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun Oleh:

Muhammad Muis

161410569

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 2020

Menyetujui:

Pembimbing

Andi Rahman, MA

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin

Andi Raman, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi

Politik Identitas Prespektif Al-Qur'an

(Kajian Tematik Ayat-ayat Politik Identitas dalam Al-Qur'an)

Disusun Oleh:

Nama : **Muhammad Muis**

NIM : **161410569**

Jurusan : **Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Fakultas : **Ushuluddin**

Telah diujikan pada sidang munaqosyah pada tanggal: 2020

TIM PENGUJI

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan

Jakarta, 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin

Andi Rahman, MA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt, karena berkat rahmat, hidayah, dan inayah-Nya lah skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Sawbeserta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Aamiin

Skripsi dengan berjudul “**Politik Identitas Prespektif Al-Qur’an**” ini merupakan sebuah upaya memahami, membahas terkait kontestasi politik yang tersaji di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang menarik. Khususnya fenomena yang sudah terjadi, yakni salah satu ekspresi politik identitas yang muncul di tengah demokratisasi yang baru ditemukanlagi di Tanah Air. Seperti yang sudah ditemukan di mana-mana, politik identitas ini menjaditantang baru yang harus dihadapi dengan hati-hati dan sungguh-sungguh, karena politik idnetitas ini seperti pedang bermata dua.

Dengan heterogenitas bangsa Indonesia menjadi hal tersendiri yang perlu menjadi sorotan. Karena, dalam proses mendapatkan kemenangan dalam pertandingan politik tentunya butuh instrumen kuat untuk mendapatkan kemenangan. Identitas Ras, Etnis, Suku, Agama pun menjadi barang unik ketika ajang perebutan politik berjalan. Semoga skripsi sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tidak banyak yang bisa dilakukan penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Karenanya, penulis merasa banyak berhutang budi pada semua pihak yang berkenan memberikan bantuan dan arahan baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tugas ini. Berkenaan dengan hal ini, penulis memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada meraka, terutama kepada:

1. Allah dan Rasulullah
2. Kedua orang tua penulis, Abah Hasan Ahmad (alm) dan Ibu Samiseh yang selalu member semangat motivasi dan yang selalu mendoakan penulis tanpa lelah.
3. Orang tua dan *murabbi* penulis selama di Jakarta, terutama kepada Bapak Jazilul Fawa'id beserta Ibu Halimah yang selalu menjadi inspirasi kehidupan penulis, dan selalu menjadi penyemangat penulis. Beliau juga yang sering

membantu penulis baik moril maupun materil. Semoga Allah selalu merahmati beliau semua. Aamiin

4. Bapak Rektor PTIQ, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA beserta para jajarannya di Institut PTIQ Jakarta.
5. Dekan Fakultas Ushuluddin sekaligus pembimbing penulis, Bapak Andi Rahman, MA beserta jajaran dosen di Fakultas Ushuluddin PTIQ Jakarta. Terimakasih atas inspirasi dan pencerahannya selama perkuliahan berlangsung.
6. Seluruh staf dan karyawan Institut PTIQ Jakarta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
7. Semua saudara penulis, kak Askudin, kak Jamilatun dan suami, kak Munifa dan suami yang selalu mendoakan penulis, dan khususnya kak Wahib yang selalu mendukung, membimbing, dan yang selalu memberi kekuatan dan ketabahan kepada penulis. Semoga Allah selalu merahmati mereka semua. Aamiin
9. Semua teman-teman penulis yang menjadi orang tua di Jakarta, para orang-orang Nusantara Mengaji, khususnya Bapak Taufiq yang sering membantu penulis dan mengarahkan penulis, dan Cak Gugus yang selalu membimbing penulis. Terima kasih atas semuanya.

Sekali lagi penulis berterimakasih kepada semua pihak baik yang tertulis maupun yang tidak. Akhir kata, semoga Allah membalas jasa mereka dengan sebaik-baiknya dan semoga Allah selalu membimbing kita semua. *Al-Fatihah*.

Jakarta, 2020

Muhammad Muis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I: PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Pemikiran	
B. Identifikasi Masalah	
C. Batasan Masalah.....	
D. Rumusan Masalah	
E. Kegunaan & Tujuan Penelitian.....	
F. Metode Penelitian.....	
G. Tinjauan Kepustakaan	
H. Sistematika Penulisan	
BAB II: RELASI ISLAM Dan POLITIK	
A. Mengenal Konsep Politik	
B. Komunikasi Politik	
C. Budaya Politik	
D. Politik dan Agama	
1. Konsepsi politik Pemerintahan Islam	
2. Etika Islam dalam Berpolitik	
E. Politik Identitas.....	
1. Pengertian politik Identitas	
2. Pemikiran Ulama NU (Nahdhotul Ulama) Politik Identitas	
3. Praktik Politik Identitas	
4. Potret Dinamika Lokal Politik Identitas	
D. Kepentingan dan Perangkat Politik Identitas Ummat Islam	
1. Politik Identitas dan Islam.....	

2. Kepentingan Politik Identitas Islam	
3. Perangkat politik Identitas Islam	
BAB III: AYAT-AYAT POLITIK IDENTITAS.....	
A. Hakikat Politik Identitas Dalam Al-Qur'an	
B. Pandangan Al-Qur'an Tentang Politik Identitas	
 C. Realisasi Pemimpin Sebagai Identitas Dalam Al-Qur'an	
 a. Al-Imam (Pemimpin	
 b. Syarat pemimpin dalam Al-Qur'an	
 D. Realisasi Pemimpin Muslim Dan Non Muslim	
 E. Realisasi Pemimpin Perempuan.....	
F. Realisasi pemimpin Agama, Suku, Ras, dan Antar Golongan	
BAB IV: PENUTUP	
Kesimpulan.....	
Saran-saran	
DAFTAR ISI.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Al-Quran adalah kitab Suci yang terakhir dan diperuntukkan manusia agar mendapat petunjuk (*hudan li al-nas dan hudan li al-muttaqin*).¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Fazlur Rahman bahwa “*Fungsi Al-Quran yang pada awalnya hanya menjadi nasihat dan tuntunan ibadah, maka saat ini sudah semestinya dapat membentuk tatanan masyarakat*”²

Turunnya Al-Quran untuk mengatur, memberi arahan dan menjadi pedoman manusia dalam segala urusan agar mencapai kesuksesan baik di dunia dan Akhirat. Sehingga tidak ada satupun sesuatu yang terlepas dari pembahasan Al-Quran, termasuk politik. Bahkan sebelum suara ajakan berkumandang Al-Quran sudah terlebih dahulu memberikan nilai-nilai dan etika.

Membahas terkait kontestasi politik yang tersaji di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memang menarik. Heterogenitas bangsa Indonesia menjadi hal tersendiri yang perlu menjadi sorotan. Karena, dalam proses mendapatkan kemenangan dalam pertandingan politik tentunya butuh instrumen kuat untuk mendapatkan kemenangan. Identitas Ras, Etnis, Suku, Agama pun menjadi barang unik ketika ajang perebutan politik berjalan.

Mengenai keberagaman atau heterogenitas ini, sejatinya Al-Quran sudah memberikan gambaran terkait hal yang demikian. Dalam QS. Al-Hujurat: 13, Allah Swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengawasi”.

¹QS. Al-Baqarah: 3 & 184

² Fazlur Rahman, “*Kata Pengantar*” Dalam *Islam* . (Jakarta: Mizan: 2017) hal. 57

Dalam *Lubabal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul* Jalaluddin al-Suyuthi menuliskan bahwa latar belakang turunya ayat 13 dari Surah Al-Hujurat adalah ketika setelah *Fathu Makkah* Bilal bin Rabah naik ke atas *Ka'bah* untuk mengumandangkan azan. Dengan kejadian ini didapati beberapa sahabat melontarkan ejekan dalam segi fisik Bilal bin Rabah. Lalu hadirilah ayat ini sebagai tanggapan perilaku tersebut bahwa Islam tidak mendikotomikan hamba berdasar pada segi fisik, ras, suku ataupun kedudukan. Islam memandang bahwa yang mulia adalah yang baik akhlak dan takwanya.³

Hal lain yang menjadi *asbabun nuzul* ayat ini adalah perintah Nabi Muhammad Saw pada Bani Bayadah untuk menerima pinangan dari Abu Hindun. Melihat bahwa Abu Hindun adalah seorang budak, maka instruksi Nabi Muhammad pun kurang dianggapi oleh Bani Bayadah. Lalu turunlah ayat ini, untuk menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi antara tuan dan budak dalam Islam⁴.

Secara eksplisit ayat di atas memberikan edukasi bahwa heterogenitas adalah sebuah keniscayaan yang harus disikapi dengan elegan. Karena Allah SWT tidak menghendaki satu kaum merasa lebih superior dari kaum yang lain, ataupun menganggap kaum lain inferior. Namun, yang dijadikan sebagai tolok ukur adalah ketakwaan dan akhlak daripada identitas kaum itu sendiri.

Di antara fakta heterogenitas Indonesia adalah dengan dimilikinya tidak kurang dari 17.000 pulau, bermacam etnisitas, subkultur dan terdapat berbagai macam bahasa lokal, kekayaan budaya. Bahkan di Papua saja terdapat kurang lebih 252 suku dengan bahasa khasnya masing-masing, yang penuh dengan warna-warni adat istiadat dan tradisi. Itu semua lestari dan terpelihara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Menurut Syafii Maarif: *“Indonesia sudah memiliki modal dasar dalam mengawal keutuhan bangsa. Mulai dari pengalaman sejarah yang terwujud dalam pergerakan Nasional, Sumpah Pemuda, Pancasila dan adanya tekad bulat untuk mempertahankan serta membela keutuhan bangsa dan negara ini. Dalam konteks*

³ Jalaluddin al-Suyuthi, *Lubabal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008) hal. 102

⁴ Asep SMR, *Pesan Al-Quran tentang Akhlak*. Dalam Jurnal: *Diya al-Afkar* (Vol. 5, No. 2, Desember 2017) hal. 67

⁵ Assyari Abdullah, *Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212*. Dalam Jurnal: *An-Nida* (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2) hal.55

keagamaan, kita temukan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua sayap besar umat Islam yang telah menyatakan dan mengukuhkan badan menjadi benteng demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Meski sering digerogeti oleh politisi salah tingkah dalam perjalanan perpolitikan pasca proklamasi, lebih dari 6 dasawarsa Indonesia bertahan dengan segala keberuntungan dan malapetaka yang dialaminya. Tantangan yang cukup serius terhadap keutuhan bangsa datang dari berbagai gerakan sempalan agama dengan politik identitasnya masing-masing.⁶

Identitas terjadi dalam proses *becoming* dalam kontinum perubahan sosial. Fenomena politik identitas yang menyeruak terdapat berbagai variasi dan mengerikan serta tentu akan melahirkan dampak yang tidak terbayangkan. Samuel Huntington: “*Identitas-identitas yang sebelumnya memiliki keserba-ragaman dan hubungan kausal menjadi terfokus dan mapan, konflik-konflik komunal biasanya disebut perang identitas*”.⁷

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Syafii Maarif bahwa tantangan keutuhan bangsa saat ini adalah *politik identitas*. Kecintaan kepada Agama tanpa dibekali pengetahuan atau keinginan mendalami informasi sering berujung pada kesalahpahaman bahkan dimanfaatkan untuk pengakomodiran massa dalam skala besar. Cukup melalui unggahan provokatif media sosial yang mengedepankan “*identitas keagamaan*” seseorang mampu untuk menggerakkan massa dalam skala yang besar dan menjadi berita yang fenomenal.

Salah satu contoh yang dapat dirujuk ketika berbicara mengenai ancaman keutuhan bangsa berbasis politik identitas adalah ketika adanya muatan-muatan narasi keagamaan yang diplesetkan dalam perpolitikan tanah air. Terlebih lagi, narasi ini mengkristal saat kasus mengenai QS. Al-Maidah: 51 yang dilontarkan oleh Gubernur DKI non-Aktif saat itu, Basuki Tjahja Purnama. Mulailah bermunculan terjemahan dan interpretasi dilakukan sesuai syahwat dan kebutuhan politik. Menurut Ahmad Najib Burhani, peristiwa tersebut yang menjadi sebab lahirnya berbagai gerakan keagamaan yang mengedepankan identitas keagamaan merupakan *critical events* (peristiwa sangat penting) untuk melihat perkembangan keagamaan di Indonesia yang berkaitan dengan *fragmentation of religious*

⁶ A. Syafii Maarif, dkk, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita*. (Jakarta: Democracy Project. 2012) hal. 19

⁷ Samuel Huntington, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (Yogyakarta: Qolam. 200) hal. 519

authorithy. (fragmentasi atau terpecah-pecahnya otoritas keagamaan).⁸

Berdasarkan pada argumentasi dan fenomena yang ada di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait Politik Identitas dalam Perspektif Al-Quran. Karena dalam beberapa kejadian belakangan yang cukup menarik adalah bahwa Al-Quran itu sendiri yang dijadikan objek dalam sukseksi politik identitas yang sedang berjalan di Indonesia. Maka sangat perlu dilakukan telaah terkait pandangan Al-Quran atas politik identitas tersebut. Demi upaya melestarikan dan merawat keutuhan sekaligus kerukunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara pengertian, politik identitas berasal dari dua kata yaitu: politik dan identitas. Pertama kita tinjau terlebih dahulu makna politik, secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani yakni *Politeia* atau *polis* yang berarti Kota atau Negara. Miriam Budiardjo memberikan makna etimologi politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu⁹. Secara etimologis identitas berasal dari kata *identity* yang bermakna sebuah ciri yang melekat pada seseorang atau kelompok misalnya agama, suku, ras dan antar golongan yang membedakan lainnya.

Maka kemudian yang menjadi pengertian daripada politik identitas adalah menjadikan identitas sebagai alat politik suatu kelompok untuk tujuan tertentu baik untuk perlawanan atau menunjukkan identitas jati diri dari kelompok tersebut¹⁰. Menurut Sri Astuti Buchari: "*Politik identitas merupakan alat politik suatu etnis untuk mencapai tujuan tertentu, di mana kemunculannya lebih banyak disebabkan oleh adanya faktor tertentu yang dipandang oleh suatu etnis sebagai adanya tekanan seperti ketidakadilan politik yang sampai mereka rasakan.*"¹¹

⁸ Ahmad Najib Burhani, *Aksi Bela Isam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. MAARIF (Vol. 14, No. 2. Desember 2016) hal. 16

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002) hal. 8

¹⁰ Mifdal Zusron Alfaqi, *Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas Serta Solidaritas*. Dalam Jurnal: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Th. 28, No. 2, 2 Agustus 2015) hal. 113

¹¹ Sri Astuti Buchari, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014) hal. 20

Kekhawatiran sejumlah tokoh Nasional terkait munculnya gejala-gejala politik identitas di Indonesia yang terekam dalam beberapa pemberitaan Nasional memang bukan tanpa alasan mendasar. Pasalnya memang politik identitas ini banyak memberikan dampak-dampak negatif yang mengancam kedaulatan NKRI dan menyirnakkan nilai-nilai persatuan Bangsa Indonesia yang sejauh ini *masyhur* sebagai bangsa yang damai dalam keberagamannya.

Mengutip dari Hukumnas.com bahwa terdapat beberapa bahaya politik identitas yang sudah semestinya diwaspadai dan diberikan perhatian khusus agar tidak sampai benar-benar terjadi perpecahan. Di antara bahayanya adalah sebagai berikut:

- Mengancam keutuhan NKRI: Munculnya gejolak politik yang mengedepankan Agama seseorang menjadi tanda-tanda politik identitas yang semakin mengental di masyarakat. Hingga, dapat kita lihat pada pemilu 2019 sangat banyak ditemukan masyarakat yang mempersoalkan ideologi dan falsafah bangsa. Tatkala perekat Bangsa dalam bentuk Ideologi Pancasila dipersoalkan, maka kemungkinan perpecahan semakin besar.
- Maraknya adu domba: Sebagaimana yang sudah kita temukan saat ini, adu domba baik secara langsung maupun via media sosial sudah masif. Ini merupakan salah satu ancaman nyata dari politik identitas. Maka, menjadi tanggung jawab bersama untuk membendung arus politik identitas.
- Hilangnya Pluralitas: Pluralisme merupakan paham atas keberagaman. Tentunya ini sudah menjadi identitas bangsa Indonesia yang sudah begitu dikenal. Dengan maraknya politik Identitas ini dapat mengancam pluralisme bangsa.
- Memunculkan Polarisasi : pengkotak-kotakan masyarakat sudah mulai terasa sejak gejolak pemilu 2014 lalu. Dimana terdapat identifikasi masyarakat antara pro-komunis ataupun pro-pribumi. Sejatinya ini sudah terjadi sebagaimana rezim orde baru yang menggemborkan isu pribumi untuk memberangus orang-orang yang disebut "*aseng*"
- Membawa perselisihan: Persoalan perselisihan di tengah masyarakat terkait politik identitas menjadi hal yang tidak terelakkan. Nyata kita ketahui bersama bahwa banyak dari keluarga yang berselisih hanya karena berbeda pilihan dalam politik. Sekiranya inilah dampak-dampak yang kian menampak dari adanya gejolak politik identitas.

Persoalan identitas memang memasuki hampir setiap sisi kehidupan manusia sejauh mana itu berkaitan dengan identitas manusia. Dalam konteks kenegaraan terdapat relasi antara lokalitas, nasionalitas dan globalitas atau internasionalitas (yang mana dalam kasus Indonesia terjadi ketegangan antara politik identitas dan modernisasi); Identitas keagamaan¹² (Agama semakin demonstratif dalam menampakkan identitas hingga pada titik tertentu dapat terjadi ketegangan-ketegangan yang menimbulkan polarisasi sosial).

Studi mengenai politik identitas tidak terlalu relevan jika hanya menjadi para ahli sebagai satu-satunya pintu referensi dalam sebuah penelitian, melainkan studi politik identitas tidak terlepas daripada subjek dan pengetahuan serta pengalaman langsung yang kadang disebut sebagai pengetahuan yang tersembunyi¹³ (*tacit knowledge*). Maka akan terasa lebih relevan jika penelitian mengenai politik identitas ini turut dilakukan dengan pendekatan konstruksionis (*constructionism approach*), pendekatan fenomenologis (*Fenomenology Approach*).

Maka, berdasar pada pemaparan mengenai politik identitas yang sudah dijelaskan, penulis mengira bahwa kajian ini perlu diperhatikan lebih lanjut karena berdampak langsung kepada pemahaman masyarakat dan kedaulatan Bangsa. Jangan sampai apa yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu Bangsa menjadi sia-sia hanya karena perebutan kekuasaan yang melahirkan perpecahan disebabkan oleh nafsu masing-masing kelompok untuk menguasai Indonesia.

Satu aspek penting lagi yang tidak boleh terlupakan adalah mengenai sisi Al-Quran itu sendiri. Selain daripada penelitian mengenai politik identitas ini akan dibawa kepada ranah penafsiran ayat-ayat Al-Quran, sebagaimana kita lihat gejolak yang terjadi di masyarakat pun tidak jauh daripada Al-Quran. Di mana kelompok-kelompok yang menampakkan identitas agama akan menyuarakan suara mereka dengan ayat-ayat Al-Quran. Tanpa peduli kajian lebih lanjut mengenai ayat-ayat yang mereka bunyikan sudah terlebih dahulu dipahami ataupun belum, yang terpenting adalah legitimasi ayat ada di tangan mereka. Tentunya ini pun berdasarkan pada argumentasi dan legitimasi sepihak.

¹² Peter Berger, *Kebangkitan Agama Menantang Politik Dunia*. (Yogyakarta: Arruz 2003) hal. 75

¹³ Polanyi, *Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Gramedia, 1996) hal. 35

Dalam memahami Ayat Al-Quran dibutuhkan pembelajaran yang mendalam dan matang sehingga Ayat-ayat Al-Quran tidak dimaknai secara sepihak, apalagi sampai membenarkan penjelasan sendiri lalu menghakimi penjelasan ayat yang berbeda paham. Hal seperti inilah yang sejatinya dapat mencederai daripada penafsiran Al-Quran itu sendiri.

Maka penulis merasa sangat perlu untuk mengkaji lebih lanjut terkait politik identitas dalam perspektif Al-Quran agar masyarakat tidak terus menerus berada dalam kebingungan terkait ayat-ayat yang dikaitkan dengan urusan politik. Lebih jauh lagi, jangan sampai berangkat dari pemahaman yang kurang utuh terhadap sebuah ayat dalam Al-Quran akan melahirkan perpecahan dalam skala yang besar atas nama Agama, lebih spesifik lagi atas nama Al-Quran.

Hal ini penulis lakukan sejalan dengan perintah yang Allah SWT Firmankan dan terdapat pada QS. Al-Alaq: 1 yang artinya “*bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan*”. Menurut Quraish Shihab dari kata *iqra* inilah melahirkan makna membaca, menyampaikan, menelaah, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, maupun membaca yang tidak tertulis sebagai teks.

Wahyu pertama ini menghendaki umat Islam untuk senantiasa membaca dengan dilandasi *bismirabbik* dengan makna bahwa pada akhirnya apa yang kita baca tersebut akan membawa kebermanfaatn bagi manusia lain.¹⁴

Al-Quran kerap dipaksakan dari segi pemaknaannya demi menyukkseskan agenda tertentu, terutama politik. Karena polarisasi yang dilakukan ini dinilai cukup berhasil dalam beberapa waktu untuk melakukan sebuah kemenangan dalam kontestasi politik. Namun berujung pada semakin menguatnya pergulatan politik identitas itu sendiri. Kesadaran yang perlu dibangun adalah bahwa Al-Quran harus dipahami secara utuh dan komprehensif agar tidak terjadi penyelewengan makna dan tetap terjaga nilai-nilainya.

Inilah hal-hal penting yang mendasari pemikiran penulis untuk melakukan kajian lebih lanjut terkait politik identitas dalam perspektif Al-Quran. Sehingga akan tercapainya pemahaman yang utuh dalam memahami realita politik yang bergulir di masyarakat dalam bingkai Al-Quran.

¹⁴ Desi Oktarianti, *Konsep Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Gramedia, 2005) hal. 45

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah sangat diperlukan guna tercapainya penelitian yang optimal dan meruncing pada pokok pembahasan serta tidak melebar:

1. Apakah Al-Quran berbicara mengenai politik Identitas? Untuk menyikapi polarisasi masyarakat di Indonesia yang telah terjadi saat ini.
2. Bagaimana Islam dalam memandang politik dan dampak buruk atas cara kerja politik yang buruk?
3. Bagaimana Analisis Al-Quran terkait politik identitas?

C. Batasan Masalah

Pembatasan dalam penelitian merupakan koridor lingkup penelitian dalam suatu masalah agar permasalahan yang dibahas dapat lebih terfokus dan tidak melebar. Perlunya dilakukan pembatasan dan perumusan masalah supaya identifikasi permasalahan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meneliti terkait gejala politik identitas yang terjadi di Indonesia dan memberikan analisis deskriptif terkait politik identitas dan historiografi daripada politik identitas di Indonesia.
2. Mengumpulkan data-data berupa ayat-ayat Al-Quran yang tergolong sesuai dengan tema pembahasan serta memberikan deskripsi argumentatif terkait penafsiran daripada ayat-ayat tersebut.
3. Memberikan implikasi daripada pemahaman yang baik atas ayat-ayat yang terkait dengan pembahasan politik identitas.

D. Masalah Rumusan

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Apa Perspektif Al-Qur'an mengenai politik identitas, dan bagaimana wawasan Al-Qur'an dalam menyikapi gejala politik dan Agama?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tentunya didasari atas keresahan penulis terkait gejolak sosial yang terjadi di masyarakat sampai sedemikian masif. Di antara tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kajian intensif terkait ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai politik identitas dan memaparkan relevansi serta implikasinya di masyarakat.
2. Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) Fakultas Ushuluddin, Institut PTIQ Jakarta

Mengenai kegunaan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritik penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih atas perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta teori sosial pada khususnya.
2. Pengkajian terkait identitas akan memberikan jawaban apakah benar jika identitas dibawa pada ranah kontestasi akan melahirkan konflik dengan yang lain.
3. Bagaimana telaah mendalam terkait ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan politik identitas ini dapat menjawab persoalan konfrontatif relasi Agama dan Negara yang sering memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Sehingga analisa yang penulis lakukan dapat memberikan dampak khusus di masyarakat.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan dengan metode *library research* atau pengumpulan data-data penelitian berdasarkan pada kepustakaan literatur-literatur terkait. Sedangkan yang menjadi teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah literatur terkait sekaligus berita-berita nasional tentang politik identitas serta pengkajian kitab-kita tafsir guna mempertajam analisis penulis terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan politik identitas.

Prosedur yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data-data terkait politik identitas yang

ada di Indonesia terlebih dahulu baik secara deskriptif maupun historiografis. Setelah itu, penulis akan berusaha memaparkan lebih lanjut terkait ayat-ayat yang sudah di himpun untuk ditelaah atau dikaji lebih mendalam dengan referensi kitab-kitab tafsir.

G. Tinjauan Kepustakaan

Dalam tinjauan kepustakaan yang penulis dapati terkait pembahasan politik identitas, belum cukup banyak. Namun karya-karya tersebut memang ditulis oleh sosok-sosok yang cukup mumpuni dalam bidang tersebut. Seperti Burhanuddin Muhtadi yang menulis *Populisme Politik Identitas* dan Syafii Maarif yang berkontribusi dalam tulisan *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Dalam buku lain yang membahas politik identitas, ada yang membahas identitas dalam potret politik berbasis kesukuan atau etnis.

Karya berupa buku ilmiah memang belum cukup masif, namun penelitian terkait politik identitas cukup masif dalam ranah jurnal ilmiah. Maka, penulis juga mengutip jurnal-jurnal terkait sebagai tambahan wawasan kepustakaan. Kebaharuan dalam tulisan penulis adalah memotret politik identitas melalui Al-Quran. Di mana memang Al-Quran (Agama) pada saat ini menjadi instrumen kuat dalam menyukseskan gejolak di masyarakat demi tercapainya tujuan politik.

Dari buku-buku yang saya lihat mengenai politik identitas, diantaranya adalah karangan Burhanuddin Muhtadi yang menulis *Populisme Politik Identitas* dan Syafii Maarif yang berkontribusi dalam tulisan *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, tulisan ini hanya menerangkan bagaimana politik identitas yang berkenbang di Indonesia dan juga menjelaskan beridentitas dengan baik. Dalam tulisan saya ini, yang membedakan dengan tulisan politik identitas yang saya baca adalah pandangan Al-Qur'an mengenai politik identitas. Apakah Al-Qur'an memperbolehkan atau sebaliknya.

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, menjelaskan relasi Islam dan politik. Dalam hal ini terbagi dalam beberapa pembahasan: Yakni Mengenal konsep politik, komunikasi politik, budaya politik, dan juga membahas tentang Agama dan politik. diuraikan mengenai relasi Islam dan politik, sekaligus membahas politik identitas dan Al-Quran secara definitif agar memiliki landasan argumentasi yang otoritatif.

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang kajian tafsir ayat-ayat politik yangsebagaiman pokok-pokok dalam pembahasan yang akan menguraikan terkait ayat-ayat yang berhubungan dan teridentifikasi memiliki relasi dengan politik identitas.

Bab *keempat*, berisi penutup yang memuat terkait penutup dan kesimpulan daripada hasil penelitian dan beserta saran yang diharapkan kemanfaatan dari semua pihak.

BAB II RELASI ISLAM DAN POLITIK

A. Mengenal Konsep Politik

Politik pada mulanya terambil dari bahasa Yunani kuno atau bahasa Latin, *politicos* atau *politikus* yang berarti *relating to citizen*. Keduanya berasal dari kata polis yang berarti warga Negara atau warga kota. Dalam bahasa Inggris, kata *politic* menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan yang berarti bijaksana.¹⁵ Politik diartikan pula sebagai kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani sesuatu masalah).¹⁶ Kata ini juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.¹⁷

Secara istilah, “politik” pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan *Republik*. Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang di bahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik.

Dari berbagai definisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefinisian politik. *Pertama*, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara, yakni dengan pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. *Kedua*, pandangan yang mengaitkannya dengan masalah kekuasaan, otoritas, dan atau dengan konflik.

Politik juga mempunyai beberapa fungsi yang terbagi dalam fungsi-fungsi masukan dan fungsi-fungsi keluaran. Yang pertama adalah fungsi-fungsi yang sangat penting dalam menentukan cara kerja sistem dan yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan

¹⁵ H. Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, (Depok : Azza Media, 2012), Cet. ke-1, h. 35.

¹⁶ Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008), h. 1201.

¹⁷ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasa, Konsepsi Kekuasaan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h 34.

kebijaksanaan dalam sistem politik.¹⁸ Fungsi-fungsi tersebut antara lain:

- a. Sosialisasi Politik. Sosialisasi antara lain berupa proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya.
- b. Rekrutmen Politik. Yang dimaksud adalah proses seleksi warga masyarakat untuk menduduki jabatan politik dan administrasi.
- c. Artikulasi Kepentingan. Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Yakni masyarakat langsung menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan melalui kelompok-kelompok dengan kepentingan yang sama.
- d. Agregasi Kepentingan. Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan, atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan, atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu.
- e. Komunikasi Politik. Fungsi ini merupakan alat penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya.

Dari beberapa fungsi-fungsi tersebut memiliki peran masing-masing dalam menjalankan dan mengatur jalannya pemerintahan dalam mensejahterakan masyarakat.¹⁹ Dalam hal ini terlihat bahwa hakikat politik adalah perilaku manusia baik berupa aktivitas maupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau mempertahankan tatanan suatu masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.²⁰ Politik juga sebagai alat utama untuk menjalankan, mengatur jalannya pemerintahan yang baik.²¹

¹⁸Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka,2001), hal.20-23

¹⁹ H. Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, hal. 36-38

²⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1993) hal. 8-9

²¹A. Malik Haramain, *Gus Dur Militer dan Politik*.(Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1, hal. 10

B. Komunikasi Politik

Suatu bahasan penting dalam mengenal politik adalah mengenal komunikasi politik, untuk memahami opini atau publik ada gunanya mengetahui sesuatu tentang komunikasi politik. Komunikasi adalah penggalian informasi untuk memperoleh tanggapan, pengoordinasian makna antara seorang dan khalayak, saling berbagai informasi, gagasan, atau saling berbagai unsur-unsur perilaku bahkan sebagai modus kehidupan melalui perangkat-perangkat aturan penyesuaian pikiran bersama dalam kelompok internal maupun eksternal.²² Komunikasi bukan sekedar penerusan dari satu sumber kepada publik, ia lebih mudah dipahami sebagai penciptaan kembali gagasan-gagasan informasi oleh public jika diberikan petunjuk dengan simbol, slogan, atau tema pokok, pembaca akan menemukan kesamaan dalam beberapa diantara definisi-definisi ini.

Beberapa makna yang tersirat dari pandangan ini patut diperhatikan. Yang terpenting adalah bahwa pembuatan manusia yang dianggap sebagai proses komunikasi itu kreatif. Melalui pergaulan sosial dan lain sebagainya, jadi komunikasi bukanlah suatu reaksi terhadap sesuatu juga bukan interaksi dengan sesuatu, melainkan suatu transaksi yang di dalamnya orang menciptakan dan memberikan makna untuk menyadari tujuan-tujuan orang itu. Tindakan apapun yang dilakukan seseorang dalam kehadiran orang lain, bahkan secara diam-diam dengan menghindari pandangan atau pergi, apalagi berbicara memiliki nilai pesan. Artinya, setiap tindakan adalah sesuatu yang orang lain dapat mengamati, menginterpretasikan, membaca makna dan menggunakannya untuk menyusun suatu kesan atau cerita, bila disederhanakan seseorang tidak dapat tak berkomunikasi bila di hadiri orang lain atau bersama orang lain.²³

Terdapat macam-macam definisi komunikasi politik. Komunikasi politik adalah siapa yang memperoleh apa, kapan, dan bagaimana pembagian nilai-nilai oleh yang disetujui kekuasaan dan pemegang kekuasaan, Pandangan yang beragam itu sesuai dengan yang biasa dilakukan orang, mencakup sesuatu yang dilakukan orang.²⁴ Komunikasi politik adalah kegiatan yang membedakan dari kegiatan yang lain, ekonomi, keagamaan, atletik, dan sebagainya. Dalam berbagai hal orang berbeda satu sama lain, jasmani, bakat,

²²Gaye Tuchman, *Komunikasi Politik*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998) hal. 5

²³Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993) hal. 6-7

²⁴Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, hal. 10

logistik, kebutuhan, cita-cita, kompetensi, motivasi, dan sebagainya. Kadang-kadang perbedaan ini membahas argumen, perselisihan, dan percekocokan. Jika mereka menganggap perselisihan itu serius, tentunya mereka dengan memperkenalkan masalah yang menentang itu, dan selesaikannya, inilah kegiatan politik.

Bila dilihat seperti itu, politik terjadi dalam setiap pengaturan politik yang ditandai dengan perselisihan, apakah pengaturan itu berjumlah negara, sekecil perkumpulan poker, atau bahkan dua orang. Bagaimanapun kita akan menggunakan istilah itu pertama-tama dalam arti konvensional yang lebih ketat, dan membahas konflik sosial dengan menggunakan lembaga-lembaga pemerintah.

Diskusi tentang komunikasi politik. ini bukan percakapan dalam arti semisal kata yang diucapkan, lebih disukai dalam arti yang lebih inklusif, yang berarti segala cara orang bertukar simbol, kata-kata yang dituliskan dan diucapkan, gambar, gerakan, sikap tubuh, perangai, dan pakaian. Ilmuwan politik Mark Roelofs mengatakan dengan cara sederhana, "Politik adalah percakapan; atau lebih tepatnya, kegiatan politik ('berpolitik') adalah berbicara." juga tidak semua pembicaraan adalah politik. Akan tetapi, "hakikat pengalaman politik, dan bukan hanya kondisi dasarnya karena politik adalah kegiatan yang dilakukan antara orang-orang."²⁵

C. Budaya Politik

Budaya politik cenderung berlaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dalam pendekatan budaya politik, individu merupakan subyek kajian yang utama dan mengkompromikan empiris, dalam arti pendapat orang peroranglah yang sedang melakukan penelitian. Terkait politik, contoh, yang lebih abstrak dengan alasan yang dibuat oleh seseorang tanpa terlebih melihat fakta lapangan, atau paling tidak, melalui penelitian yang melibatkan orang banyak.

Budaya politik adalah cara orang berpikir, mendukung, dan berusaha melawan sistem politik serta bagian-bagian yang ada di dalamnya, termasuk juga bagian atas yang mereka miliki di dalam sistem politik. Orientasi atau kecenderungan individu terhadap sistem politik terbagi tiga, yaitu: Pertama, memahami kognitif, yaitu

²⁵Jalaluddin Rahmat, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*, hal.14-15

menciptakan pengetahuan dan meminta warga negara di dalam konstitusi, bagaimana individu mengetahui tata cara pemilihan umum, bagaimana individu mengetahui partai politik dan aktivitas partai tersebut, bagaimana individu yang memahami perilaku pemimpin-pemimpin mereka melalui pemberitaan massa, merupakan contoh dari memahami kognitif ini. Pengetahuan-pengetahuan ini tidak boleh. Pengetahuan bertambah atau tetap seiring dengan pengaruh-pengaruh dari lingkungan sekitar individu.

Kedua, percakapan afektif. Orientasi ini berbeda dengan orientasi kognitif, oleh sebab orientasi afektif bergerak di dalam interaksi perasaan. Di Indonesia, kebijakan-kebijakan seperti bantuan tunai langsung, Askeskin, pembagian kompor gas, dan sejenisnya sesuai dengan maksud untuk mengubah afektif warga negaranya. Tujuan akhirnya adalah, agar masyarakat mendapat dukungan dari pimpinan politik, dan mereka akan memilih para pemberi bantuan di kemudian hari.

Ketiga, orientasi evaluatif. Orientasi ini merupakan campuran antara fokus kognitif dan afektif di dalam bentuk keputusan / tindakan. Misalnya, setelah mengetahui tentang partai A atau B memang benar menyuarakan apa yang mereka inginkan, masing-masing memilih mereka di dalam pemilihan. Atau, kelompok individu yang menggabung unjuk rasa untuk mendukung seorang kandidat yang tengah diserang oleh para lawan politiknya, satu-satunya yang bisa mereka kenal dan sedikit tahu akan jatidiri si politisi termaksud. Orientasi evaluatif muncul sebagai hasil dari orientasi kognitif dan afektif. Tipe-tepe budaya politik tersebut adalah:

1. Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial merupakan tipe budaya politik di mana ikatan individu terhadap sistem politik tipe budaya politik ini, tidak ada peran politik yang mendorong khusus. Individu tidak mengharapkan perubahan apa pun dari sistem politik. Ini diakibatkan oleh sebab individu tidak memercayai mereka adalah bagian dari suatu bangsa secara keseluruhan. mereka, misalnya suku mereka, agama mereka, atau daerah mereka.

Budaya politik parokial kentara misalnya, di dalam budaya masyarakat yang masih nomaden²⁶. Misalnya ini terjadi di kafilah-kafilah badui jazirah Saudi, suku-suku pedalaman Indonesia seperti Kubu, Dani, Asmat, Anak Dalam, dan sejenisnya. Contoh ini dalam pengertian fisik. Namun, parokialisme dapat pula dikembangkan dalam pengertian lebih luas. Misalnya, dapat disebut sebagian warga dari Republik Indonesia sebagai penganut budaya politik karena mereka tidak melibatkan diri sebagai warga negara Republik Indonesia.

2. Budaya Politik Subyek

Subkultur Budaya adalah politik yang tingkatannya lebih tinggi dari parokial oleh sebab individu yang memakainya. Individu politik subyek juga memberi perhatian yang cukup atas politik akan tetapi sifatnya pasif. Mereka melaporkan berita-berita politik tidak bangga datang, dalam arti, secara emosional mereka yang berbudaya tidak puas terlibat dengan negara mereka. Saat mereka tengah membicarakan masalah politik, perlu ada perasaan tidak nyaman oleh sebab mereka tidak mempercayai orang lain begitu saja. Di ujung yang lain, saat berhadapan dengan negara mereka lemah dan tidak bisa melakukan apa-apa.

Budaya politik subyek banyak berlangsung di negara-negara yang kuat (pemerintahan yang kuat) tetapi bercorak otoritarian atau totalitarian. Misalnya, budaya ini banyak terjadi di Indonesia pada saat pemerintahan Presiden Soeharto (masa Orde Baru). Di masa-masa tersebut, orang yang tidak beruntung harus membicarakan masalah politik dengan bebas, terlebih lagi mengkritik presiden ataupun berlibur. Masalah seperti ini juga terjadi di Cina, Korea Utara, Kuba, atau sebagian negara makmur seperti Arab Saudi, Singapura, atau Malaysia, yang sistem politiknya belum sesuai dengan demokrasi.

3. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah budaya politik yang lebih tinggi tingkatannya lebih banyak subyek. Dalam budaya politik partisipan, individu yang mengerti tentang mereka adalah warga negara yang memiliki hak atas apa yang diminta. Wajib mengeluarkan,

²⁶Berbagai komunitas masyarakat yang memilih hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain di padang pasir atau daerah bermusim dingin, daripada menetap di suatu tempat.

menyetujui pekerjaan, memahami, pendidikan, dan di sisi lain wajib untuk, membayar pajak.

Dalam budaya politik partisipan, sering dan bebas membahas masalah politik. Mereka bergantung, hingga tingkatan tertentu dapat mempengaruhi jalannya perpolitikan negara. Mereka pun membebaskan dan mendukung organisasi politik untuk memprotes atau mendukung pemerintah. Jika tidak menyusun organisasi politik, mereka pun ikut bergabung dalam organisasi sukarela baik politik maupun tidak. Saat mengikuti pemilihan mereka cukup berbangga hati. Budaya politik partisipatif banyak terjadi di negara-negara dengan tingkat kemakmuran dan keadilan yang cukup tinggi. Jarang budaya politik partisipan di negara-negara yang masih bercorak otoriter, totaliter, atau terbelakang penuh ekonomi.²⁷

D. Politik Agama

1. Konsepsi politik Pemerintahan Islam

Konsepsi politik pemerintahan Islam tampak begitu menonjol dalam komposisi strukturalnya. Konsepsi-konsepsi tersebut memulai berbagai kecenderungan manusia dan menempatkannya sesuai dengan keperluan pengabdian yang wajib. Dalam salah satu konsep yang disebutkan di atas, tugas pemerintahan Islam adalah semua yang diperluaskan tentang eksploitasi yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat dalam semua urusan politik, ekonomi, dan kecerdasan intelektual.

Pembebasan akan membuat seluruh kekuatan dan potensi mereka menjadi karya konstruktif yang terarah. Upaya pembebasan manusia dari eksploitasi menjadi pertimbangan antara lain:

Melalui energi dan potensi individu yang dieksploitasi telah disia-siakan demi memenuhi kepentingan pribadi serta demi menambah kekayaan. Setelah para individu tersebut dibebaskan dari hisapan, energi dan potensi miliknya akan bermanfaat bagi kemajuan manusia.

Lewat cara dan saat yang sama, energi dan potensi pemanfaatan eksploitasi juga menjadi sia-sia lantaran semata-mata disetujui dan diboroskan untuk terus memperketat kontrolnya atas

²⁷ H. Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, hal. 40-44

orang-orang yang dieksploitasi. Setelah dieksploitasi dihapuskan, energi dan potensi yang melekat pada dirinya akan kembali pada titik normal sehingga mudah diarahkan ke penyelenggaraan berbagai aktivitas yang serba konstruktif.²⁸

Dalam sejarah, banyak orang jenius yang bertekuk lutut di bawah tekanan kakinya, dan terjerat dalam bingkai eksploitasi. Para tiran akan berusaha menghancurkan orang-orang jenius itu. Sebaliknya, pemerintahan Islam akan memutuskan menciptakan atmosfer terbuka yang layak bagi pertumbuhan dan perkembangan orang-orang semacam itu. Pengalaman sejarah Islam yang unik telah memberikan kesaksian atas kenyataan faktual semacam itu. Islam mengembalikan kebebasan dan martabat manusia yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu dari ras, keturunan, kedudukan atau kekayaan.²⁹

Pada mulanya, banyak dari mereka yang ada di masyarakat pra-Islam bersetatus budak atau yang menjalani hidup nyaris seperti seorang budak. Namun pada akhirnya mereka bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang bermartabat di kemudian hari. Mereka mampu membuktikan diri sebagai kehidupan, suka intelektual, politik, dan militer. Dalam individu yang kreatif dalam berbagai bidang, kemajuan individu, kapasitas dan politik Islam tak satu pun yang sanggup menggerakkan tensi sendiri.

Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sebagai menulis surat kepada gubernurnya di Mesir: "Menyetujui kinerja dan kerja keras setiap individu. Jangan mengukur prestasi seseorang dengan prestasi orang lain. kecil dari seorang besar menjadi besar dan pekerjaan menjadi besar dari seorang kecil menjadi remeh.

Konsepsi politik lain melandasi pemerintahan Islam terkait langsung dengan posisi aktual para penguasanya. Dalam pemerintahan Islam, para penguasa akan menjalankan kehidupan pribadi yang diajukan layaknya warga yang lain. Dalam kehidupan sosial, tidak ada perbedaan antara dirinya dan warga negara yang ada dalam pemerintahannya. Umpama dalam hal interaksi, kepemilikan rumah, dan interaksi dengan orang lain.

Dalam hal ini, penulis tengah menguraikan posisi yang sebenarnya ada dan tetap mewakili Islam. Jika diketahui, hanya ada

²⁸Muhammad Husein, *Al- Hukuma al- Islamiyah*, (Kairo: Dar al- Ma'arif, 1999) hal. 56

²⁹Sayyid Qutub, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004) hal. 78

satu saja yang akan dipublikasikan, yang akan diterbitkan. Bahkan jabatan resmi itu sendiri tak bisa diposisikan sebagai contoh atau idaman yang sempurna diteladani dan dikejar. Demi melanggengkan kekuasaan atas rakyat, para penguasa zalim, melakukan tipu daya untuk mereka. Mereka mengeluarkan perjanjian- perjanjian yang diumumkan antara diri mereka dengan rakyat yang mereka kuasai. Namun dalam kehidupan praktis, perjanjian-perjanjian ini tidak lebih dari kata ganti kata-kata yang tidak memiliki arti apapun dan penyelesaian guna pertolongan yang timbul di antara kehidupan para penguasa dengan rakyat jelata dan antara hak-hak prerogatif, pertama dengan ketidakberdayaan kelompok kedua.

Dalam pemerintahan Islam, konsep ini bukan suatu bahan perjanjian yang dituliskan dengan kata-kata yang indah memikat. Akan tetapi, diterapkan dan diterapkan dalam kehidupan nyata, dialokasikan oleh pengalaman sejarah Islam dan bahkan penempatan di masa kita sendiri. Pengalaman sejarah berbicara kepada kita tentang pemerintahan Islam, Ali bin Abu Tholib, berdiri di hadapan hakim di samping rakyat biasa yang membuat pengaduan mendukung. Dalam masalah tersebut, pengadilan memutuskan penggugat dan pemohon untuk memberikan keputusan di antara mereka.³⁰

Pada acara lain selama masa pemerintahan Umar bin Khathab, seorang Yahudi, yang tinggal di bawah pemerintahan Islam, mengadukannya dengan Ali bin Abu Tholib kepada Umar. Sang khalifah mengundang Yahudi dan sepupu Nabi suci itu ke pengadilan. Ketika khalifah sedang mendengarkan mereka, ia memperhatikan gelagat terhormat dan kekalahan di wajah Ali, dan mengira bahwa ia telah menyatukan Ali karena ia meminta keadilan dengan para leluhur. Namun Ali berkata kepada Umar, "Aku tidak senang karena kamu tidak meminta sama kepadaku dan kepadanya. Kamu mendukung sikap lebih menghargai kepadaku dan memanggilku dengan nama julukanku, namun kamu tidak bisa melakukan hal yang sama kepadaku."³¹

Dengan cara ini, pemerintahan Islam merupakan contoh terbaik persamaan di pemerintahan hukum, di antara pemerintahan

³⁰Shubhi Mahmasani, *Falsafah Al- Tasyri' Fi- Islam*, (Beirut: Dar al- Ilm li – almalayin, 1988) hal. 89-91

³¹Sayyid Muhammad Baqir, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001), hal. 26

dan rakyat. Dalam pemerintahan Islam kehidupan pribadi atasan menyediakan teladan yang nyata untuk kaum apa-apa tentang kemurahan hati dan daya tarik spiritual. Tidak memiliki kepemilikan untuk memiliki istana mewah dan kendaraan-kendaraan mutakhir, kelompok-kelompok jetset, dan memiliki rumah tangga yang menawan, atau ia tidak mengoleksi permata-permata dan perhiasan-perhiasan lain.

Ali bin Abi Thalib sebagai berkata, "Haruskah aku bahagia akan diriku sendiri dengan panggilan Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman), dan tidak sanggupkah aku bersimpati kepada mereka yang mempertanyakan hidup, dan tidak bisakah aku menjadi satu teladan bagi mereka dalam mengarungi kehidupan pahitnya?"

Program yang pemerintah Islam tanamkan ke kehidupan sehari-hari yang praktis di kelas tidak perlu diraih dengan bakat baru. Ia memunculkan setiap individu yang terlibat sehingga memunculkan program ini merupakan masalah hormon dan prestise yang dimilikinya demi menanggapi aktivitas-aktivitas yang diprakarsai oleh pemerintah.³²

Konsep politik pemerintah Islam membahas pula metode-metodenya yang berjalan di internasional. Metode pelaksanaannya sangat berbeda dengan pelatihan Barat yang membahas tentang eksploitasi rakyat miskin dan menghisap darah mereka. Tidak seperti kekuatan-kekuatan Barat, pemerintahan Islam tidak mengatakan itu kebijakan berdasarkan kebutuhan.³³ Adalah kebenaran, keadilan, dan dukungan dari pihak-pihak yang tidak beruntung membentuk dasar kebajikannya. Ia tidak memberikan *lips-servise* atas prinsip prinsip ini seperti menuntut masalah dan kemudahan dan mendukung hidup, atau tidak menggunakan kesenangan dunia demi tujuan propaganda dan eksploitasi. Sesungguhnya pemerintahan Islam diikat dengan kebenaran, keadilan, dan dukungan dari pihak-pihak yang kurang beruntung tadi.

Seperti yang kita bahas, adalah tradisi PBB dan organisasi internasional lainnya yang menyediakan ruang bagi persetujuan kepentingan antarnegara di gedung pertemuan mereka, sepanjang hal itu mendukung kepentingan kepentingan (negara) besar. Hal ini dibahas di sana dalam proporsi demi kepentingan besar. Namun jika

³²Rasyidi, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2005) hal. 46

³³Husain Fauzi, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hal. 57

kekuatan besar (negara adikuasa) tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menarik kepentingannya, maka pertemuan antarnegara tidak bisa memperoleh akses ke dalam koordinasi organisasi-organisasi yang mendorong ini.

Dalam hal ini melalui sejarah Muslim, kita menjumpai contoh-contoh unik yang tidak ditemukan sejarah bangsa bangsa lain. Contoh-contoh ini terkait dengan eksklusif dengan kurun Nabi suci melihat dan penerus-penerus beliau. Namun juga bisa terlihat dalam periode yang disapu bersih oleh badai dahsyat dari perjuangan-ambisi kaum tiran³⁴. Misalnya, kita menemukan selama pemerintahan Umar bin Abid Aziz pasukan Muslim di bawah perintah Qutaibah mengeluarkan fakta pertahanan bersama dengan penduduk Samarkand³⁵. Namun, masuklah mereka ke dalam kota, pasukan Muslim gagal untuk menerima tanggung jawab yang telah mereka sepakati. Penduduk Samarkand mengadukan hal itu ke khalifah, yang diminta kepala penaklukan agar datang bersama wakil-wakil penduduk kota di hadapan qadhi (hakim), sehingga ia dapat memutuskan perselisihan mereka. Qadhi mengeluarkan keputusan yang memuaskan penduduk kota, dan membatalkan keputusan penakluk. Pernahkah Anda mendengar atau menyaksikan suatu pertemuan penakluk dikecewakan, dan itu bukan oleh suatu organisasi dunia atau forum internasional namun oleh pengadilan yang pemerintahannya memiliki peradilan semacam itu.

Perilaku pemerintahan Islam merupakan manifestasi ayat Al-Qur'an ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

"Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu jadi orang orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, jadilah saksi dengan adil. Dan tolonglah sekali-kali kebencian kamu terhadap seorang pria mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku

³⁴Seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi yang disebut dengan sistem pemerintahan tirani, (Tirani adalah kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang, Negara yang diperintah oleh seorang raja atau penguasa yang bertindak sesuka hati).

³⁵Merupakan nama kota di Uzbekistan. Letaknya di bagian tengah. Tepatnya di Provinsi Samarqand, Uzbekistan, Samarkand adalah kota yang sangat tua, yang didirikan hampir 3 ribu tahun. Alexander Agung menaklukkan kota itu pada tahun 329 SM. Yunani menyebutnya "Marakanda". Pada saat itu, dan juga kemudian Samarkand adalah sebuah kota penting di Jalur Sutera dari Cina ke barat.

adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Mâ-idah: 8)

Tak pelak lagi sebagai sekiranya pemerintahan Islam memperlakukan diri sendiri dengan semangat ini di panggung internasional, jiwa manusia akan dibangun di tengah-tengah masyarakat dunia, konsepsi keadilan dan ketulusan akan disuntikkan untuk mereka dan mereka akan distimulasi ke barisan bersama di jalur kebajikan dan kejujuran.³⁶

2. Etika Islam dalam Berpolitik

Dalam Al-Qur'an (dan Hadis) terdapat sejumlah kata yang berarti masyarakat atau komunitas, seperti kata *ummat (umam)*, *syab' (syu'ûb)*, *qabilah (qabdil)*, dsb. Namun di dalam Al-Qur'an tidak ditemukan istilah negara. Hal ini dapat dimaklumi karena konsep negara atau negara-bangsa seperti yang terjadi sekarang ini baru muncul pada abad ke-16 yang dikemukakan oleh Nicolo Machiavelli (1469-1527). Pada masa klasik dan pertengahan tidak pernah ada di antara para ulama mengenai agama dan negara menyatu atau terpisah, karena dalam ikatan, para khalifah adalah pemimpin negara dan juga agama (*hirasah al-din wa siyasa al-dunya*) Namun pada masa kini hal ini kadang-kadang masih diperdebatkan di kalangan intelektual Muslim. Jika istilah "masyarakat Islam" sudah sepakat tentang ketentuannya, maka istilah "negara Islam" masih diperdebatkan, bahkan konsep atau ide-ide tentang "negara Islam" pun kadang-kadang masih dipersoalkan oleh kalangan tertentu.³⁷ Islam adalah agama yang memiliki sistem berpolitik yang khas. Umat Islam harus kembali kepada ketatanegaraan Islam itu, yakni sistem dari Rasulullah dan Khulafa'ur Rasidin.³⁸

Pada umumnya, istilah umum negara Islam itu tidak diperebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, tetapi konsep negara itu dalam Islam, karena secara substansial termasuk ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menunjukkan keterwakilan pemerintahan pada umat Islam. Nabi Muhammad tidak hanya sebagai Nabi tetapi juga pemimpin umat yang dapat disebut sebagai negara. Di samping itu, terdapat banyak

³⁶Sayid Muhammad Baqir asy-shadr, *Sistem Politik Islam*, hal.24-31

³⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: At Tahiriyah, T Tp,) Cet, ke-1, hal. 17

³⁸Andi Rahman, *Modus Sukses Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah*, Dalam *Jurnal Mumtaz*, (Jakarta: Institut PTIQ,2012),Vol.02, No.2 hal.75

ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Allah di dalam kehidupan masyarakat dan negara, meskipun tidak ada satu pun ayat yang menunjukkan tentang pengaturan negara.³⁹ Hal ini kemudian diselesaikan, negara atau pemerintahan itu hanya sebagai sarana untuk menegakkan hukum-hukum itu, sehingga membentuk negara termasuk dalam kaedah: *mà là yatimm alwajib illa bih fahuwa wājib* (apa saja yang bisa dilakukan oleh agama itu dapat dilakukan dengan bantuannya, maka demikian juga menjadi wajib). Dari segi istilah, "negara Islam" (daulah Islamiyyah) itu sendiri baru muncul pada pertengahan abad ke-20 yang lalu, yang diterjemahkan sebagai negara yang melakukan etika dan syariah Islam. Istilah dawlah ini bendungan dari istilah yang telah digunakan pada masa kekhalifahan Dinasti Mu'awiyah dan Abbasiyah (dawlah Umawiyah dan dawlah 'Abbasiyyah), yang pada waktu itu diartikan sebagai "pembaruan din dinasti".⁴⁰

Di dalam Al-Qur'an Ada prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang harus dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehabis membahas bagaimana cara melakukannya, harus ada landasan etika kehidupan politik umat Islam.

1. Kejujuran dan tanggung jawab (*al-amanah*)

2. Keadilan (*al-'adalah*)

Kedua prinsip tersebut antara lain terdapat dalam Q.S.An-Nisa', 57, Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan disetujui memantapkan hukum diantara manusia hendaknya kalian menetapkan dengan adil, Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang menyenangkan bagi kalian.⁴¹

3. Persaudaraan (*al-ukhuwwah*)

Prinsip ini antara lain termasuk dalam Q.S.al-Hujurat, 10: "Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara". Dengan ijtihad tentang hubungan antar warga negara, persaudaraan ini kemudian dikembangkan menjadi ukhuwuh basyariyyah

³⁹Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Perca, 1985) Jilid II, hal. 89

⁴⁰Mahmud Shaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) Cet. III, hal. 37

⁴¹Abdul Rashid, *Ilmu Politik Islam*, hal.73-75

(persuadaraan kemanusiaan), yang didukung oleh ayat al-Hujurat ayat 13.

4. Menghargai kemajemukan (*al-ta'addudiyah*).

Prinsip ini antara lain ada dalam QS. al-Hujurat, 13: "Wahai manusia, sungguh Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, dan membuat kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu bisa saling berhubungan. Sesungguhnya orang yang beruntung diantara kamu adalah yang paling bertaqwa".

5. Persamaan (*al-musawah*)

Prinsip ini antara lain termasuk dalam Q.S. al-Hujurat, 13.

6. Permusyawaratan atau partisipasi warga (*al-syura*)

Prinsip ini antara lain termasuk dalam Q.S. al-Syura, 38: "Dan urusan mereka diputuskan secara musyawarah di antara mereka", dan Q.S. Ali Imran: 159: "Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"

7. Perdamaian (*al-silm*)

Prinsip ini antara lain terdapat dalam Q.S. al- Anfal, 61: "Dan jika mereka musuh condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertaqwalah kepada Allah."

8. Tanggung jawab sosial (*amr bi al-ma'ruf wan-nahy 'an al-munkar*)

Prinsip ini antara lain termasuk dalam Q.S. Ali Imran, 104: " Dan apakah ada di antara kamu, golongan umat yang menyeruh kepada kebaikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar".⁴²

Prinsip-prinsip tersebut pada dasarnya juga merupakan prinsip-prinsip yang berlaku universal, yang tidak hanya didukung oleh Islam, tetapi juga didukung oleh negara-negara yang beradab pada umumnya, sementara substansinya tidak sama persis dengan konsep Islam dengan konsep sistem atau ideologi lain. Perbedaannya terletak pada prinsip filosofi prinsip Islami yang menentukan *uluhiyyah* (Ketuhanan) dengan prinsip lain yang dibangun atas dasar filosofi sekularisme.

⁴²Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, hal. 118

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan etika dan moral dalam kehidupan politik umat Islam, sehingga semua perilaku dan budaya politik umat Islam harus sesuai dengan pemikiran. Di samping prinsip-prinsip tersebut, di dalam agama Islam juga terdapat di makna-makna, hukum di tempat, hukum di bidang ibadah, *ahwal al-syakhshiyah* (hukum perorangan), *mu'amalah* (hukum perdata), *jinayah* (hukum kejahatan) serta *siyasah* (hukum tata negara). Agak berbeda dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang lebih tinggi itu universal, sebagian hukum Islam ada yang partikular, yang hanya disukai oleh umat Islam saja, demikian pula hukum umum, hukum ini juga rasional. Oleh karena itu, jika implementasi prinsip-prinsip universal yang relatif lebih mudah dilakukan asalkan ada kemauan politik dari pemerintah dan kekuatan politik, maka implementasi hukum-hukum partikular secara keseluruhan adalah kemudahan yang mudah dan bahkan dilematis.⁴³

Etika dan moral politik ini menjadi prioritas untuk dilaksanakan, karena hal ini berkaitan dengan inti dari misi risalah yang dibawa Rasulullah. Dijinkan dalam Hadis: "Aku hanya diutus semata-mata. untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia".⁴⁴ Akhlaq mulia (*al-akhlaq al-karimah*) adalah melakukan tindakan-tindakan yang terpuji (*mahmudah*) dan mencegah tindakan-tindakan tercela (*madzmumah*). Prinsip-prinsip yang membahas di atas menjadi pedoman praktis dalam mewujudkan akhlaq ini, yaitu amanah, keadilan, persudaraan, pemahaman, kemitraan kemajemukan, musyawarah, perdamaian dan kontrol penuh (*amr ma'ruf nahi munkar*).

Landasan etika moral ini sangat penting, agar tidak hanya ada satu-satunya di aturan lahiriyah (formalistik) yang ada di beberapa hal yang memungkinkan seseorang membicarakan moral atau menggunakan wilayah abu-abu yang kadang-kadang dilakukan oleh mereka yang tidak mengindahkan moralitas ini. Tiadanya landasan etika dan moral akan membalikkan masyarakat atau negara, atau minimal menimbulkan krisis di berbagai bidang kehidupan. Lebih kongkritnya, tanpa kehadiran akhlaq ini muncul wewenang / keputusan, penghalalan segala cara untuk memperoleh kekuasaan atau kekayaan, penindasan atau penzaliman terhadap orang lain, yang lebih lemah, egoisme, kelompok, dan pemunculan konflik, tiadanya penegakan

⁴³Maskuri Abdillah, *Membangun Masyarakat Qur'ani*, (Jakarta: Radians Presesi Media, 2007), hal. 50-54

⁴⁴ Hadits di atas diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dalam al-Musnad, sahih, walhamdulillah. Perawi-perawinya tsiqah. Hadits ini juga memiliki syahid (penguat) dari hadits Mu'adz bin Jabal z dalam riwayat al-Bazzar.

hukum yang dituntut guna membantu, dan sebagainya. Adalah suatu keharusan bagi umat Islam untuk menjadikan etika-moral politik tersebut menjadi dasar bagi pembahasan, tindakan, nilai-nilai dan norma-norma dalam kehidupan politik suatu bangsa, sehingga umat Islam menjadi bangsa yang beradab.⁴⁵

E. Politik Identitas

1. Pengertian Politik Identitas

Mengaca dari perkebangnya zaman, politik identitas semakin menjadi tolak ukur dalam mencapai tujuan. Identitas merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, Identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita. Sementara itu, melihat identitas sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.⁴⁶ Kalau dilihat dari pengertian dalam kajian sosiologi kontemporer, politik identitas tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang beku, tetap, tak berubah.

Identitas dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang dibentuk terus-menerus, bahkan selalu mengalami perkembangan yang sangat pesat oleh masyarakat. Merunut pada pengertian tersebut, Identitas akan selalu melapisi gerakan seiring dengan perubahan ruang dan waktu. Dalam kajian sosiologi, etnisitas dibedakan dari ras, kelas, dan status sosial yang merupakan salah satu unsur stratifikasi sosial masyarakat.⁴⁷

Kajian tentang etnisitas berkaitan erat dengan kajian tentang identitas. Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Universitas Duke, mendefinisikan: Politik identitas adalah pemberian garis yang tegas untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tampak tidak dapat dirubah, maka status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta tampak bersifat permanen.⁴⁸

⁴⁵Seyyed Hossein, *Islam Tradisi*, (Bandung: Pustaka, 1994), Cet. I, hal. 123-126

⁴⁶Kamus besar Bahasa Indonesia

⁴⁷Yosafat Hermawan Trinugraha, *Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas*, Dalam Jurnal: *Setudi Pemuda* (Vol. 2, No. 2, September 2013) hal.3

⁴⁸Muhtar Habbodin, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, Dalam Jurnal: *Jurnal Studi Pemerintahan* (Vol.3 No.1 Februari 2012) hal.120

Melihat dari perkembangan yang terjadi di Indonesia, Politik identitas yang terjadi lebih dominan terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan aktor-aktor lokal yang diartikulasikan melalui pemekaran daerah. Dengan melihat dari berbagai hasil studi menjelaskan, bahwa desentralisasi adalah faktor penentu munculnya politik identitas. Praktik politik dimasa desentralisasi menjadikan isu etnisitas; suku, agama dan golongan sebagai alat legitimasi politik dalam meraih tercapainya suatu tujuan.⁴⁹

2. Pemikiran Ulama NU (Nahdlatul Ulama) Tentang Politik Identitas

Ada tiga hal mendasar yang menjadi inti beridentitas sebagai politik Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU. Pertama, ia yakin bahwa Indonesia hanya akan bisa bangkit jika umat Islam sebagai komponen terbesar bangsa tidak terpecah belah, tetapi bersatu padu dalam beridentitas, Dalam *al-Qanun al-Asasi* Kiai Hasyim Asy'ary menyatakan:

Perpecahan adalah penyebab kelemahan. Kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kemacetan adalah banyak model identitas sebagai jalan. sumber keruntuhan dan kebinasaan, dan penyebab kenistaan dan kehancuran, siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka-buka lembaran yang tidak lebih dari ihwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman dan apa yang dilaporkan pada saat-saat kepunahannya; akan memahami bahwa kejayaan yang pernah menggelimangi mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah menjadi perhiasaan mereka, tidak lain adalah berkat apa yang kukuh mereka dan pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka.

Kedua, menurut Hasyim Asy'ary, seperti disampaikan dalam amanatnya, politik untuk umat Islam memiliki tiga tujuan, yaitu (1) memberikan bantuan bagi setiap muslim, (2) memberikan bantuan rakyat, dan (3) mewujudkan keadilan yang setara. Kiai Hasyim sangat prihatin dengan tujuan utama orang Islam yang menggunakan agama untuk mencapai tujuan-tujuan politik, baik pribadi maupun kelompok dalam arti sempit.

⁴⁹Wantona Saradi. *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan (Vol. 6, No. 1, April 2018), hal. 2

Ketiga, bagi Hasyim Asy'ary, Islam tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan secara baku. Dalam amanatnya, ia mengatakan bahwa kompilasi Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, tidak ada yang menerima pesan apa pun tentang bagaimana memilih kepala negara. Karena itu, pemilihan kepala negara dan banyak hal lagi tentang kenegaraan tidak ditentukan dan umat Islam tidak diperlukan untuk mengambil satu sistem. Yang terpenting adalah sistem tersebut dapat mewujudkan tiga tujuan politik seperti di atas.⁵⁰

Selain beliau, juga ada pemikiran lain yakni KH. Syaifuddin Zuhri beliau adalah ulama yang produktif dalam menulis, dalam Islam menurut beliau ada tiga faktor penting itu untuk bisa dicapai. Pertama, Islam pada dasarnya agama yang mekedepankan kecerdasan berfikir dalam soal kepercayaan dan keyakinan. Kedua, dalam Islam dapat ditemukan landasan budaya yang praktis dan masuk akal. Ketiga, Islam merupakan unsure kekuatan baru yang tumbuh dan selalu tumbuh terus, penuh dinamika dan menggandung harapan-harapan baru.⁵¹

3. Praktik Politik Identitas

Politik identitas jika dilihat dari gaya berkembangnya yakni muncul dari kelompok-kelompok klan yang tumbuh dan berkembang sebagai penanda (identitas) kewilayahan. Melihat praktik *klan* ini Kebanyakan ditemukan di beberapa wilayah Kecamatan dan daerah-daerah tertentu. Klan yang ada dalam masyarakat disebut Belah. Belah ada dua hal,

Pertama: yakni pada tempat atau pemukiman dan kedua, belah menandakan garis *geanologis* yang merujuk pada sistem *patrilineal* atau garis keturunan. Melaltoa (1983) menyebutnya sebagai sistem (*moiety*). Sistem (*moiety*) ini diartikan sebagai hubungan yang dibangun atas dasar pelapisan sosial yakni keturunan (*kuru*) yang terbagi dalam dua paroh masyarakat. Paroh masyarakat adalah bentuk kesatuan sosial yang merupakan satu dari bagian masyarakat yang *unilineal* (garis keturunan) satu paroh masyarakatnya merupakan bagian dari beberapa *klan*.

Dalam kontestasi politik, sentimen mengenai politik identitas dijadikan sebagai instrumen politik dalam pemilihan kepala daerah, Pertentangan Belah juga diciptakan untuk memperoleh pengaruh dan

⁵⁰Umaruddin Masdar, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2008) Cet. 1, hal.16-17

⁵¹Saifuddin Zuhri, *KH. Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri NU*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2004). Hal.60-61

legitimasi kekuasaan sesaat, dan seringkali digunakan sebagai atribut untuk mencapai kekuasaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa, keberadaan identitas tersebut merupakan konstruksi sosial yang terbentuk melalui peristiwa sejarah dalam waktu tertentu yakni, pra kolonialisme, masa kolonialisme, pasca kemerdekaan hingga reformasi.⁵²

4. Potret Dinamika Lokal Politik Identitas

Dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih secara langsung oleh masyarakat untuk memperoleh kekuasaan. Kontestasi perebutan kekuasaan dibentuk dinamika politik lokal berbasis identitas, sehingga makin menarik dan menjadi populer saat menjelang pemilihan. Dengan demikian, identitas politik menjadi instrumen di era desentralisasi pemilihan kepala daerah.

Dinamika politik lokal yang mempertemukan antara kedua pihak dalam permainan aktor semata. Identitas direproduksi hanya sebagai upaya membunuh karakter lawan politik melalui basis-basis kewilayahan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Cara yang paling ampuh untuk mempengaruhi masyarakat di tingkat desa untuk memilih kandidat kepala daerah tertentu.

Kontestasi aktor yang terjadi di dalam politik adalah memperebutkan kekuasaan, yang di tuju adalah di tingkat elit dan berkembang. Cara praktiknya dengan mempropagandakan (orang) yakni antara pihak satu dengan pihak satunya di masyarakat desa. Fakta lain juga menunjukkan, selain praktik politik identitas bahwa, dua calon kandidat kepala daerah yang dianggap memiliki elektabilitas tinggi mempersiapkan masing-masing calon kandidat tandingan untuk merusak atau memecahkan prolehan suara.⁵³

F. Kepentingan dan Perangkat Politik Identitas Islam

1. Politik Identitas dan Islam

Dalam wacana Islam hukum yang paling tinggi adalah Al-Qur'an dan Hadist. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas bahwa menyatakan wajib negara untuk memproduk undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam dan tolak keras terhadap ideologi

⁵²Wantona Saradi. *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Hal.3-4

⁵³Wantona Saradi. *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: Jurnal Sosiologi Pedesaan, Hal.8-9

lainya selain Al-Qur'an dan Hadits yang mereka sebut dengan "hukum kafir".⁵⁴

Dengan melihat kondisi politik yang ada di Indonesia, perlu memberi makna politik dari ayat sebagai kepentingan politik umat Islam yaitu moralitas (Jalan Allah, sabilillah), Perubahan struktur (Jalan kaum teraniaya, Sabililmustadh'afin, dan mekanisme politik yang baik.⁵⁵ kebangkitan politik identitas Islam perlu digunakan untuk mengawal dengan melalui upaya pembangunan citra diri sebagai sesama. Muslim harus menentukan dan bahkan harus memilih mereka yang seagama dan seiman sebagai jalan mempersatukan mereka. Dan upaya ini perlu dijalankan. Dengan representasi ayat Al-Qur'an dengan fatwa ulama digunakan sebagai cara mengalag dukungan pemilih untuk memilih pemimpin Muslim, seperti ini merupakan upaya untuk membangun solidaritas identitas bersama sebagai sesama umat muslim.⁵⁶

2. Kepentingan Politik Identitas Islam

Selama ini ada kerancuan berpikir. Kegiatan politik identitas umat Islam terlalu umum, sama dengan kegiatan dakwah dan sosial sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan gerakan akhlāqul karīmah. Tentu saja semuanya adalah hak masing-masing, tetapi yang menyebabkan agama "kekuatan moral. Dalam beridentitas tujuan itu harus jelas. jelas bergerak politis, harus spesifik, agar orang tahu apa yang perlu dikerjakan, dan untuk apa dia bergerak. Politik identitas adalah kekuatan pemaksa dan tidak "mendukung" kekuatan moral. Politik identitas memerlukan kebijakan publik, bukan kesalehan pribadi.⁵⁷

Sebagian orang memakai teori dan konsep "sekuler" untuk menjelaskan kepentingan-kepentingan politik identitas umat, sehingga sering Islam disalahpahami atau orang berpikir demikian Islam tidak punya teori dan konsep yang murni (asli). Label "fundamentalis" atau "skripturalis" atau "literals" membuktikan bahwa kita punya masalah dengan terminologi.

⁵⁴ Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Dalam Jurnal: KritikIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Vo 2 No.1 Juni 2016) hal.3

⁵⁵ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997). Hal.205-206

⁵⁶ Endang Sari, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Dalam Jurnal: KritikIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, hal.3-11

⁵⁷ Muhammad Al-Burai, *Paradikma Politik Identitas Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 46

Ada dua isu politik identitas yang penting dalam moralitas, yaitu moralitas publik dan moralitas politik. Sebagai moralitas keduanya berasal dari moralitas pribadi. Moralitas pribadi menjadi moralitas publik karena pemasyarakatan (sosialisasi, sosialisasi), sedangkan moralitas pribadi jadi moralitas politik identitas karena pelembagaan.⁵⁸

Selama ini umat Islam hanya pasif, karena itu mereka selalu ditinggalkan, seolah-olah hanya berguna pada waktu krisis memuncak. Kebetulan umat Islam punya "*crisis psychology*" sangat terampil dalam suasana krisis, tetapi tidak tau apa yang harus dikerjakan pada waktu normal. Sekarang umat Islam tidak berada di luar ataupun di pinggir, tetapi di pusat, sejarah politik Indonesia menunjukkan adanya pergeseran peranan umat Islam dari pinggir ke tengah, dan Islam harus mengataur jalanya roda berpolitik.⁵⁹

Sebuah pernyataan Islam sebagai pengendara dalam politik beridentitas antara lain:

Pertama, Islam adalah agama yang serumpun dengan agama Yahudi dan Kristen. Sebuah tinjauan tentang Islam dan politik dalam perbandingannya dengan apa yang sudah ada dalam agama Yahudi dan Kristen lebih mempermasalahkan simpati maupun memahami atau memandang Islam sebagai sui generis (unik).

Kedua, Islam telah berkembang lebih ke arah "keulamaan" muslim yang secara institusional berbeda dan lebih baik hierarkis. Namun, berkenaan dengan politik identitas dan hubungan masyarakat negara, pengalaman kaum muslim lebih mirip dengan pengalaman Kristen dan berbeda dengan pengalaman kaum Yahudi.

Ketiga, Pemikiran politik identitas Islam menekankan kesatuan dan komunitas. Akibatnya Islam kurang memberikan nilai terhadap individu dan individualisme seperti dalam pemikiran Kristen (dan Barat). Salah satu prinsip penataan yang terdapat di sejarah muslim adalah kebencian yang menarik terhadap setiap tindakan atau perdebatan yang mungkin menimbulkan fitnah (pertikaian, permusuhan antar saudara, godaan, dan bagainya).

Keempat, Hubungan yang dilakukan dengan para pemimpin politik muslim untuk membantakan doktrin agama dari hasil yang dapat dilihat dalam sejarah Kristen. Ini bukan maksud dari kebijakan politik yang netral dalam soal-soal keagamaan, penguasa-penguasa muslim biasanya menghindari masalah-masalah yang menyangkut akidah atau

⁵⁸Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), hal.206

⁵⁹ Stephen Sulaiman Schwart, *Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global*, (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1, hal. 191

amaliah dan mendorong toleransi terhadap komunitas agama yang berkepentingan.

Kelima, Islam benar-benar memberi nilai keagamaan yang penting terhadap kehidupan yang baik dan memberi kontribusi yang baik kepada komunitas di dunia ini. Mengasingkan diri dari dunia dan menolak kebermaknaan dunia ini adalah tercela.

Formulasi yang sangat umum di atas dapat dipertahankan dengan mengacu kepada sejarah dan ilmu pengetahuan yang ada dewasa ini.⁶⁰

3. Perangkat politik Identitas Islam

Di bawah ini akan diuraikan perangkat politik identitas yang terdiri dari perangkat-perangkat doctrinal, structural, cultural.

a. Doktrinal

Sumber hukum dalam Islam biasanya disebut sebagai empat, yaitu Al- Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas yang biasanya bersumber pada keempat-empatnya. Bisa juga hanya untuk Al-Quran dan As-Sunnah saja. Lebih dari yang akan diputuskan bukan masalah hukum, seperti masalah politik identitas ini, tentu dua sumber lebih dari cukup.

Ijtihad adalah kekuatan penggerak Islam (daya gerak Islam). Kerasulan telah berakhir, tetapi dengan ijtihad agama dapat menjawab diskusi-diskusi baru. Kerasulan telah berakhir, tetapi agama tetap hidup, selalu berkembang, dan terus maju. Ijtihad itu bisa individual, bisa dikumpulkan.

Ijtihad memerlukan dua unsur, yaitu ulama dan intelektual. Ulama mewakili nilai, keabadian, dan hati nurani. Intelektual mewakili konteks, masa kini, dan rasionalitas. Diharapkan hasil dari ijtihad akan mampu membawa umat dalam menjalankan dunia kontemporer, tidak menjadi terasing, dan tetap memiliki identitas Islam. Karena politik identitas itu sangat kontekstual, berubah dengan cepat, maka untuk setiap perubahan baru perlu ada ijtihad baru. Memang ada nilai-nilai abadi yang mengatasi ruang dan waktu, tetapi ada banyak kekhususan yang perlu dipertimbangkan.

b. Struktural

Dalam sosiologi agama ada yang disebut organisasi sosial iman, yaitu diskusi tentang bagaimana agama itu dilembagakan dalam

⁶⁰L. Carl Brown, *Wajah Islam Politik, Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003), hal. 115-117

masyarakat yang konkret. Dalam hal ini kita ingin menyebut jamaah masjid, tarekat, usrah, majelis-majelis taklim. Ormas-ormas, dan umat yang tak ikut. Itu semua adalah strukturasi dari umat.

Yang akan kita bahas di sini adalah suatu cara bagaimana cara mengajak umat "memainkan" struktur yang ada untuk memperoleh kepentingan-kepentingannya. Secara politis, dalam masyarakat Indonesia, ada empat pemain, yaitu umat, OPP, pemerintah, dan kelas sosial. Kelas sosial itu ada dua macam: kelas untuk dirinya sendiri (kelas untuk dirinya sendiri, ingin merebut hegemoni sosial, ingin memusnahkan lawannya) dan kelas dalam dirinya sendiri (kelas pada dirinya sendiri, kelas yang ada secara objektif). Di sini yang kita maksud dengan kelas sosial adalah kelas untuk itu sendiri. Subjek dan objek pembangunan adalah Partikel itu. Subjek dan objek politik identitas adalah komponen-komponen itu.⁶¹

c. Kultural

Tujuan terbentuknya politik identitas secara nasional adalah demi terbentuknya Negara rasional. Di negara-negara sekuler "rasional" hanya berarti barang-barang yang kasat mata (berwujud). Dalam konteks Indonesia, negara "rasional" berarti negara yang secara bersamaan memperhatikan dua kepentingan negara: (1) yang abstrak (nilai, moral, agama), dan (2) yang konkret (sandang, makanan, papan).

Di masa lalu politik Indonesia dikenal sebagai politik budaya atau politik makna atau bisa disebut dengan politik identitas. politik yang menghubungkan budaya (politik aliran, pilarisasi politik). Kelompok politik diorganisasikan secara vertikal, bukan politik berdasarkan kelas horizontal. Agama, budaya, dan nilai-nilai yang sama bergabung dengan satu, tidak peduli kelasnya. Demikianlah PNI mewakili budaya priyayi, Masyumi mewakili santri modernis, NU mewakili santri tradisional, dan PKI mewakili abangan. Ada pengamat yang mengatakan bahwa di Indonesia ada politik berdasarkan kelas sejak Orde Baru.⁶²

d. Prosesual

Sudah pernah disinggung tentang mobilitas sosial vertical dari orang kecil abangan, dan sejak terbentuknya Orde Baru terjadi proses mobilitas sosial ke atas dari orang kecil santri. Mobilitas-mobilitas

⁶¹Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, hal. 215

⁶²Sayyed Hussein Nasr, *Islam Tradisi Di Tengah Kanca Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994), hal. 73-97

sosial itu mempengaruhi bidang ekonomi, sosial, agama, budaya, dan politik. Pengucilan umat dari politik bisa diteruskan dengan fakta sosial berupa dominasi dalam politik identitas dari wong cilik abangan yang membutuhkan "sekuler". Naiknya wong cilik santri ke tempat domisili adalah tempat masuknya sejarah logistik, sewajarnya, dan tanpa usaha dipahami dari umat, sehingga umat hanya bisa bersyukur, tidak bisa menuntut apa-apa.

Islam harus benar-benar jadi rahmatan lil alamin, umat harus bisa adil. Ini berarti jangan hanya "hitam jadi putih, putih jadi hitam" dengan pengucilan-pengucilan. Selain jika betul terjadi konvergensi sosial antar wong cilik (santri dan abangan), tidak ada lagi alasan sosial untuk pengucil, dengan kata lain pengucilan tidak didukung oleh interaksi sosial.

Klaim salah satu OPP yang mewakili wong cilik cewek ditanya tentang orang kecil mana yang diminta. Orang kecil yang sedang naik, orang kecil yang kecil berjalan di tempat, atau yang lebih kecil dari orang kecil? Mereka semua adalah umat, sehingga benar-benar adalah OPP yang mewakili sebagian besar umat, sementara OPP yang lain mewakili umat yang lain.⁶³

⁶³Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, hal. 212-217

BAB III: AYAT-AYAT POLITIK IDENTITAS

A. Hakikat Politik Identitas Dalam Al-Qur'an

Politik identitas dalam Al-Qur'an yakni sebuah kalimat yang terdiri dari tiga suku kata yaitu politik, identitas, dan Al-Qur'an. Oleh karena itu untuk memahami kalimat tersebut harus diuraikan terlebih dahulu makna masing-masing kata.

Untuk Kata pertama, "politik", sebagaimana telah dijelaskan di atas.⁶⁴ Dalam bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan tentang ketatanegaraan atau urusan terkait (kebijakan, siasat dan sebagainya) tentang negara atau terhadap negara lain. Politik diartikan serta sebagai kebijakan, kata ini juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.⁶⁵

Dalam kamus-kamus bahasa Arab modern, kata politik biasanya diartikan dengan kata-kata *siyasah*. Kata ini juga diartikan dengan sebagai mengemudi, mengendalikan, mengatur, dan sebagainya.⁶⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara maupun terhadap negara lain. Politik juga dapat diartikan sebagai tindakan, kebijakan cara bertindak dalam menghadapi suatu masalah.

Adapun yang kedua adalah, "identitas" sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa identitas merupakan hal pokok dalam mengenal diri ataupun mengenalkan diri terhadap lingkungan yang ada, mulai dari identitas diri sendiri, identitas keluarga, identitas lembaga, bahkan identitas warga negara, mulai dari ras, suku dan lain sebagainya bahkan kadang juga pemimpin pun harus jelas identitasnya. Menurut para pakar merupakan refleksi diri atau cerminan diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, etnis dan proses sosialisasi, identitas pada dasarnya merujuk pada refleksi dari diri kita sendiri dan persepsi orang lain terhadap diri kita, identitas

⁶⁴ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), Cet. Ke-27, hal. 437

⁶⁵ Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008), hal. 1201

⁶⁶ Abdul Muin Salim, *Fiqih Siyasah, Konsepsi kekuasaan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 34

juga sebagai pendefinisian diri seseorang sebagai individu yang berbeda dalam perilaku, keyakinan dan sikap.⁶⁷

Adapun yang ketiga adalah, “Al-Qur’an”, Secara etimologis berarti bacaan, dalam Q.S Al-Qiyamah ayat 17-18 yang bunyinya:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

Sesungguhnya mengumpulkan Al-Qur’an (didalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya (pada lidahmu) itu adalah tanggungan kami, (karena itu), jika kami telah membacanya, hendaknya kamu ikuti bacaannya Q.S Al-Qiyamah ayat 17-18.

Adapun menurut istilah, Al-Qur’an berarti: kalam Allah yang merupakan mu’jizat yang di turunkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang disampaikan secara mutawatir dan yang membacanya adalah ibadah. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa Al-Qur’an adalah kalamullah, firman Allah SWT. Ia bukan kata-kata manusia, bukan pula kata-kata jin, syetan atau malaikat. Sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk, dan bukan syair juga ataupun pemikiran filsafat manusia.

Al-Qur’an sampai kepada kita secara mutawatir. Artinya diriwayatkan dari generasi ke generasi oleh banyak orang yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk berdusta, dengan demikian Al-Qur’an selalu dijaga terpelihara keasliannya dari generasi ke generasi hingga ahir zaman. Dan membaca Al-Qur’an dinilai ibadah, ini yang membedakan Al-Qur’an dengan bacaan-bacaan yang lain seperti kitab-kitab nabi terdahulu atau hadis-hadis Nabi Muhammad Saw.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Al-Quran adalah Kalam Allah Swt. yang sudah terejawantah ke dalam bahasa manusia yaitu bahasa Arab. Sebelum ditransformasi ke dalam bahasa Arab, Kalamullah tentu saja abstrak dan tidak dapat diterjemahkan oleh manusia, sebab tak ada yang bisa menggapai bahasa Tuhan. Namun setelah Kalamullah ini dikongkritkan ke dalam bahasa Arab, Ia dapat dipahami oleh manusia.⁶⁸

Adapun yang dimaksud dengan politik identitas dalam Al-Quran adalah istilah-istilah Al-Quran yang berkaitan dengan politik

⁶⁷ Yosafat Hermawan Trinugraha, *Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas*, Dalam Jurnal: Setudi Pemuda (Vol. 2, No. 2, September 2013) hal.3-5

⁶⁸ H. Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur’an*, hal. 57-61

identitas dalam dunia perpolitikan. Kendati kata politik identitas tidak sepenuhnya diterjemahkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, namun ditemukan dalam penelitian yang menemukan beberapa istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas dalam perpolitikan. Kendati dalam hal ini tidak sesuai dan tidak sistematis saat ditampilkan yang dikenal pada era modern ini, namun melalui kajian yang melingkupi di mana-mana Al-Quran memberikan isyarat mengenai politik identitas dalam dunia perpolitikan. Rangkain istilah ini juga terkait dengan pengarah besar-besaran Al-Quran terhadap kebijakan politik beridentitas.

B. Pandangan Al-Qur'an Tentang Politik Identitas

Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan istilah-istilah yang mengisyaratkan tentang politik identitas, untuk mengetahui lebih dalam mengenai istilah-istilah tersebut pastinya akan melihat dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, diantaranya mengenai pemimpin itu harus laki-laki atau perempuan, pemimpin itu harus muslim atau non muslim, pemimpin harus dari suku atau rasnya masing-masing, dan lain sebagainya, berikut ini akan diuraikan satu persatu.

1. Realisasi Pemimpin Sebagai Identitas Dalam Al-Qur'an

Identitas pemimpin yang melekat dalam diri seseorang dapat saja sekaligus mewakili institusi baik itu etnisitas, agama dan nasionalitas, sehingga dalam kejadian PILKADA DKI Jakarta kemarin dan melihat gubernur jawa timur yang dipimpin oleh seorang tokoh wanita yakni Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si. Menunjukkan bahwa pemimpin sebagai identitas menentukan bagaimana seseorang menentukan pilihan masing-masing dalam memilih pimpinan, tentunya sangat penting Al-Qur'an mengambil alih dalam menyelaraskan hal ini. diataranya adalah:

a. Al-Imam (Pemimpin)

Diantaranya ayat yang berbicara tentang al-iman adalah Q.S. Al-Baqarah ayat 124

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّهَا إِنَّا تَجَوَّعْنَا لِكَالِنَاسِ إِمَامًا قَالَ أَوْ مُنذِرًا لِّبَنِي الْعَالَمِينَ
الظَّالِمِينَ

Dan Ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhanya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman: Janji-Ku ini tidak mengenai orang yang zalim. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 124.

Ayat di atas dengan tegas menyebutkan kata imam yang berarti pemimpin, yakni doa Nabi Ibrahim terbukti bahwa keturunan beliau banyak yang menjadi pemimpin, dalam ayat lain yang berbicara tentang pemimpin Q.S. Al-Ambiya’ [21] ayat 73.

وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang member petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembayang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. (Q.S. Al-Ambiya’ [21] 73)⁶⁹

Ayat ini berbicara tentang tataran ideal tentang pemimpin yang akan memberikan bantuan bagi masyarakat masyarakat, seperti yang ada pada diri para nabi, manusia memilih Allah Swt. Karena sepenuhnya korelatif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteksnya para nabi memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat manusia ke jalan yang mensejahterakan umat manusia.⁷⁰

Menurut Ibnu Katsir, ciri utama yang disebutkan di awal kedua ayat yang berbicara tentang kepemimpinan ideal tersebut adalah para pemimpin itu senantiasa mengundang rakyatnya ke jalan

⁶⁹(Q.S. Al-B aqarah [2]: 124.dan (Q.S. Al-Ambiya’ [21] 73)

⁷⁰ Menurut Ar-Razi, jika melihat munasabah (korelasi) antara ayat maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat dia atas merupakan landasan prinsip dalam mencari figur pemimpin ideal yang akan memberikan kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun. Lihat Fakhruddin ar-Razi, Mafatih al-Ghoib,1999, hal. 563

Allah dan kemudian bergabung dengan mereka anggota keteladanan dengan terlebih dahulu mencontohkan pengabdian dalam kehidupan sehari-hari menegakkan shalat dan menunaikan zakat, sehingga mereka menjadi kelompok 'abid' (hamba) yang senantiasa tunduk dan patuh mengabdikan kepada Allah Swt dengan merealisasikan ajaran-ajaran-Nya yang mensejahterakan umat.⁷¹

Dalam tafsir Al-Munir Marah Labid, “*sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia*”, yakni panutan dalam agama sampai hari kiamat, dan orang yang demikian keadaannya pasti dia adalah dari seorang rasul ataupun nabi, dan para mereka yang sebagai pewaris nabi dari kalangan keturunannya dan yang diperintahkan untuk mengikutinya secara garis besar. Dan juga tidak akan dari orang-orang kafir dan setiap orang yang durhaka.⁷²

Dalam Tafsir Al-Azhar, pemimpin disini kita mendapat suatu pelajaran yang dalam sekali, tentang jabatan yang begitu mulia yang dianugerahkan tuhan kepada seorang di antara Rasul-Nya. setelah beliau lulus dalam berbagai ragam ujian yang berat itu dan diatasi-nya segala ujian itu dengan jaya, barulah tuhan memberikan jabatan kepada-nya, yaitu menjadi Imam bagi manusia. Imam ialah orang yang diikuti, orang yang menjadi pelopor, yang patut ditiru diteladan, baik berkenaan dengan agama dan ibadat, atau akhlak. Imam itupun diberikan pula kepada orang-orang yang dipilih tuhan dari kalangan anak-cucunya dan sanggup menghadapi ujian.

Imam yang dimaksud di sini adalah *Imamah* Agama, bukan kerajaan dan bukan dinasti yang dapat diturunkan kepada anak. Sebab itu keturunan Ibrahim tidaklah boleh membanggakan diri karena mereka keturunan imam besar. Adapaun kalau mereka zalim, bukanlah kemuliaan yang akan didapat lantaran mereka keturunan Ibrahim, melainkan berlipat gandalah dosa yang akan mereka pikul, kalau mereka yang terlebih dahulu melanggar apa yang dianjurkan oleh amanat nenek-moyangnya.

Oleh sebab itu maka jabatan imam yang diberikan Allah kepadanya, adalah hal yang wajar. *Imamah* yang sejati tidaklah mudah didapat oleh sembarang orang. Kekayaan harta bisa

⁷¹ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1999), hal. 368

⁷² Muhammadiyah Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid, jilid*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), hal. 114-115

diwariskan kepada anak. Pangkat jabatan jadi raja boleh diturunkan, tetapi *Imamah* yang sejati haruslah melalui ujian.⁷³

b. Syarat pemimpin dalam Al-Qur'an

Dalam Islam adanya pemimpin dalam suatu komunitas masyarakat adalah sesuatu yang wajib, berdasarkan pada berbagai ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kepemimpinan, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Pemimpin adalah tugas berat yang tanggung jawabnya tidak cukup di dunia tapi juga hingga di akhirat, oleh karena itu, kendati berbeda pendapat para ulama sepakat untuk menetapkan syarat-syarat khusus bagi orang-orang yang ingin menjadi pemimpin.

Misalnya Imam al-Mawardi, Menetapkan tujuh syarat bagi seorang pemimpin muslim yaitu: (1) Adil, (2) Berilmu sampai tingkatan mujtahid, (3) Sehat jasmani, (4) Cerdas, (5) memiliki kemampuan untuk memimpin, (6) Berani berkorban untuk mempertahankan kehormatan dan berjihad dengan musuh dan.⁷⁴

Sementara Ibnu Khaldun menetapkan persyaratan menjadi pemimpin hanya empat, yaitu: (1) Berilmu sampai tingkatan mujtahid, (2) Adil, (3) Kifayah atau mendukung kesanggupan berpolitik, (4) Sehat jasmani dan rohani. Adapun Abdul Qadir Audah menetapkan syarat menjadi pemimpin kedalam delapan hal, yaitu:

1. Islam. Diharamkan mengangkat pemimpin seorang kafir (QS. Al-Imran: 28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan

⁷³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura,1990), Jilid.1, hal. 194-195

⁷⁴ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Shadir, t.th), hal.

Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.(Q.S. Al-Imron, 28)

karena seorang kepala negara yang kafir tidak mungkin mau dan bisa melaksanakan hukum syariah yang menjadi tugas khalifah. Begitu juga diharamkan mengangkat orang kafir sebagai hakim karena hukum ditegakkan dalam (Q.S. An-Nisa': 141)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَالَهُ يَحْكُمُ بِبَيْنِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah kami (turut berperang) beserta kamu?" Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nisa': 141)⁷⁵

2. Pria. Wanita menurut tabiatnya tidak cukup memimpin negara, karena pekerjaan itu membutuhkan kerja keras seperti memimpin pasukan dan menyelesaikan berbagai persoalan.

3. Taklif. Yaitu sudah dewasa, di mana posisi khalifah adalah penguasaan atas orang lain.

4. Ilmu Pengetahuan. Yaitu ahli dalam hukum Islam dan bila memungkinkan mencapai taraf mujtahid. Pertanyaan umum tentang hukum internasional, perdagangan internasional, dan lain-lain.

5. Adil. Yaitu menghiiasi diri dengan sifat-sifat kemuliaan dan akhlakul karimah, terhindar dari sifat fasik, maksiat, keji dan munkar.

6. Kemampuan dan kecakapan. Yaitu di samping mampu mengarahkan umat, pemimpin juga mampu membimbing umat ke jalan yang benar-benar sesuai dengan ajaran Islam.

7. Sehat jasmani dan rohani. Yaitu khalifah tidak boleh buta, tuli, bisu, dan cacat.

⁷⁵(Q.S. Al-Imron, 28) dan(Q.S. An-Nisa': 141)

8. Keturunan Quraisy. Di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini, karena hadis yang mengatakan imam dari Quraisy selama mereka melaksanakan dengan adil, diarahkan untuk maksud terbatas, waktu dan tempat terbatas. Jadi tidak berlaku umum.⁷⁶

2. Realisasi Pemimpin Muslim Dan Non Muslim

Pembahasan mengenai kepemimpinan ini hampir semua mazhab sepakat bahwa keberadaan pemimpin adalah wajib hukumnya. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa pemimpin bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan: “Penguasa yang zalim adalah lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali”⁷⁷ Dan ada juga pendapat yang mengatakan bahwa enam puluh tahun bersama pemimpin yang jahat lebih baik daripada satu malam tanpa pemimpin.

Dalam hal pemimpin pastinya perlu juga ada pembahasan Al-Qur’an tentang pemimpin ini harus muslim atau non muslim?, kalau melihat dari uraian syarat-syarat menjadi pemimpin di atas perlulah penjelasan lebih mendalam pandangan Al-Qur’an tentang hal tersebut. Pemimpin di masa Rasulullah sangat menentukan Islam ini sebagai pemimpin, Q.S. At-Taubah: 65

وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ
تَسْتَهْزِئُونَ

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanya bersendagurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, dan ayat-ayat-Nya serta Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" (at-Taubah: 65)

Isi surah Madaniyah ini terkait dengan perihal orang munafik yang dari kaum Yahudi. Mereka tidak senang melihat perkembangan Islam di Madinah. Dari waktu ke waktu Islam bertambah kuat. Jumlah kaum muslim bertambah banyak, kedudukan sosial mereka bertambah tinggi. Kehadiran Nabi Muhammad dan kaum muslim di Madinah mengusik kehidupan yang selama ini mereka nikmati. Mereka eksis dan berjaya dengan cara terus mengadu suku-suku Aus

⁷⁶ H. Jazilul Fawaid, *Bahasa Politik Al-Qur’an*, hal. 114-118.

⁷⁷ Ibnu Taimiyah, *As-Siyasah Asy-Syar’iyah Fi Ishlahi Ar-Ra’i Wa-Arra’iyah*, (Kairo: Maktabah Ar-Risalah,t.th.), hal. 79.

dan Khazraj, dua kabilah besar di Madinah, sehingga keduanya terlibat peperangan "Buáts". peperangan berkepanjangan yang berlangsung selama puluhan tahun.

Dengan cara itu, kaum Yahudi menikmati kehidupan mereka sebagai penguasa ekonomi di Madinah. Namun, setelah Nabi Muhammad hadir di kota itu dan mampu mempersatukan kedua kabilah tersebut, tetapi orang-orang Yahudi sedikit demi sedikit mulai goyah, semakin terjepit dan tidak mendapatkan tempat di hati penduduk Madinah. Dengan melihat itu, banyak di antara mereka yang mengambil sisi mendua, berpura-pura menjadi orang Islam, namun dalam hatinya penuh dengan kekafiran dan kebencian terhadap Nabi dan para sahabatnya. Perkataan mereka sangat menyakitkan kaum muslim, seperti "*Sammin kalbak, ya'kulka*" (gemukkanlah anjingmu, kelak anjingmu itu akan memangsamu). Ungkapan "satire yang sangat menusuk hati" ini ditujukan kepada Nabi dan sahabatnya yang datang ke Madinah dalam susah, namun setelah lama tinggal di Madinah, orang Islam menjadi kuat dan meminggirkan peran mereka dalam kehidupan sosial.

Ayat di atas diturunkan berkenaan dengan sikap orang munafik yang mengolok-olok Nabi, Al-Qur'an, para sahabat Nabi, dan menjadi pelajaran bagi semua, bahwa mengolok-olok lambang keislaman membawa konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat.⁷⁸

Kalau di tarik kesimpulan dari kisah perjalanan pemimpin di masa Rasulullah, maka perlu pemimpin itu adalah harus orang muslim dan bahkan haram orang islam di pimpin orang non Islam. Dalam (QS. Al-Imran: 28)

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka.(Q.S. Al-Imron, 28)⁷⁹

⁷⁸ Ahsin Sakho Muhammad, *Keberkahan Al-Qur'an, Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, (t.tp, PT Qaf, 2017), Cet.1, hal. 314-317.

⁷⁹(Q.S. Al-Imron, 28)

Tapi ketika diterapkan di negara Indonesia pasti beda dengan pada masa Rasulullah, karena negara Indonesia berdiri di atas kebhinekaan dalam banyak hal, dari agama, suku bangsa, adat istiadat, dan sebagainya. Negara dan seluruh komponen bangsa perlu diperhatikan baik-baik. Negara harus hadir dalam kompilasi penistaan agama dan simbol-simbolnya dengan menggunakan pencegahan melalui cara-cara yang persuasif, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Jangan sampai merebak, menjalar lebih jauh lagi.

Kita tentu saja mengagumi beberapa negara di dunia yang bukan negara Islam, tetapi sistem yang diberlakukan menjadikan warga negara tenteram, aman, dan damai. Mereka saling menghargai, saling menghormati, memahami perasaan pihak yang berlainan agama. Jadi negara ini menjadi negara yang aman dan damai, penduduknya rukun walau berlainan kepercayaan, hidup mereka sejahtera. Kita selaku kaum muslimin harus mampu menciptakan seperti itu, dengan semboyan "*wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'ali itsmi wal udwan*" adalah saling membantu sama dalam membantu dan ketakwaan serta menggunakan yang sama untuk dosa dan kezaliman.

Berdasarkan dari setiap tempat pemerintahan atau negara, yakni tidak mengharuskan pemimpin itu muslim atau non muslim, karena dilihat dari setiap negara berbeda dalam pemerintahanya, kalau melihat di masa Rasulullah pemimpin harus muslim bahkan haram pemimpin non muslim. Namun kalau di Indonesia pemimpin harus muslim itu tidak bisa, karena Indonesia bukan negara Islam tapi negara demokrasi.

Dari pendapat para ulama di atas maka Indonesia ini termasuk mengikuti pendapat ulama Imam al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, tidak mengikuti Abdul Qadir Audah.

3. Realisasi Pemimpin Perempuan

“Perempuan adalah Penyangga peradaban bangsa”, begitulah kira-kira kalimat yang pernah dilontarkan Sayyid Quthub dalam menyikapi peran perempuan kontemporer. Banyaklah sudah pergerakan kandas di tengah jalan, karena kita mengabaikan potensi dan eksistensi kaum perempuan. Maka kalau berbicara soal eksistensi dan potensi peran perempuan sejatinya adalah membicarakan persoalan peradaban masa depan suatu bangsa, apalah artinya

pembangunan dan modernisasi suatu masyarakat jika tidak melibatkan peran serta perempuan.⁸⁰

Misalnya saja di era orde baru, kaum perempuan tidak lebih sekedar alat politik untuk mendukung status quo daripada sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Berbagai organisasi keperempuanan yang dibentuk penguasa saat itu, telah menempatkan kaum perempuan pada peran-peran domestic. Hal inilah yang menyebabkan kaum perempuan Indonesia saat ini sering mengalami berbagai tekanan, baik psikis maupun fisik. Sedangkan laki-laki menjadi pusat otoritas dalam berbagai pengambilan keputusan dan kebijakan publik.

Untuk itu perlu kiranya dilakukan rekonstruksi pemikiran dan gerakan perempuan guna mengangkat harkat dan martabat perempuan Indonesia saat ini, bahkan perlu dijadikan jargon bagi kaum perempuan dalam konteks kehidupan bernegara, khususnya perjuangan politik.⁸¹

Dalam kehidupan politik publik, negara-negara pihak wajib melakukan semua langkah tindak yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik di negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan, atas dasar kesetaraan dengan laki-laki:

a. Untuk memilih dalam pemilihan umum dan jejak pendapat publik dan dapat dipilih dalam pemilihan untuk semua lembaga berdasarkan pemilihan umum.

b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah dan implementasi kebijakan dan menduduki jabatan publik dan menjalankan semua fungsi pemerintahan di semua tingkatan.

c. Untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi non pemerintahan dan asosiasi yang berhubungan dengan kehidupan publik dan politik negara.⁸²

⁸⁰ Khaeron Sirin, *Rekonstruksi Pemikiran Dan Gerakan Perempuan, Dalam Jurnal: Pembangunan Masyarakat Qur'ani*, (Jakarta: Radians Presisi Media, 2007), hal. 92.

⁸¹ Muntah Azri, *Masa Depan Kaum Wanita*, (Surabaya: Alfikr, 2008), Cet.ke-3, hal. 81

⁸² Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal. 87-88

Realisasi pemimpin perempuan, Al-Qur'an ikut andil dalam membahas hal ini. Apakah Al-Qur'an membolehkan atau melarang pemimpin perempuan?. (Q.S. An-Nisa,:34)

الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. An-Nisa,:34)

Dalam ayat ini memang tidak ada kejelasan tentang imam perempuan bagi makmum laki-laki. Yang ada hanyalah penegasan bahwa laki-laki itu menjadi pelindung, pemimpin dan pengayom bagi perempuan. Karena imam dalam sholat itu merupakan pemimpin bagi jamaahnya, sedangkan yang diberi hak oleh Allah Swt untuk jabatan pemimpin adalah laki-laki, maka hal itu berarti perempuan tidak diberi hak untuk menjadi imam dalam shalat berjamaah yang makmumnya adalah laki-laki.

Bukankah konteks ayat ini yang berkaitan dengan urusan rumah tangga, yaitu tentang urusan suami istri, karena ayat yang menyangkut *nafaqah*?. Lebih suka ayat diteruskan sampai titik, maka seluruhnya membicarakan masalah rumah tangga atau hubungan suami istri. Mengapa harus di bawa dalam masalah shalat berjamaah, bahkan untuk masalah masalah kepemimpinan umum?

Kalau dilihat dari segi arti memang benar-benar argumen ayat itu tentang masalah rumah tangga. Tapi perlu dibahas tentang masalah rumah tangga yang lebih kecil dibandingkan dengan shalat berjamaah, apalagi masalah kemasyarakatan, bahkan kenegaraan. Jika dalam masalah yang lebih kecil seperti rumah tangga saja, wanita tidak dibolehkan menjadi pemimpin, maka dalam masalah-masalah

yang terkait lebih besar seperti kemasyarakatan dan kenegaraan, tentu saja wanita lebih tidak dibolehkan untuk menjadi pemimpin.⁸³

Dikisahkan seorang sahabat Nabi yaitu Ummu Waraqah. Memang ada Hadis yang mengizinkan wanita menjadi imam shalat berjamaah. Beliau adalah seorang wanita sahabat Nabi Saw dari golongan Anshar (pribumi Madinah). Ada kisah yang melatarbelakangi, sehingga ia diizinkan oleh Nabi Saw untuk menjadi imam shalat berjamaah.

Ketika Nabi Saw hendak berperang melawan orang-orang musyrik Mekah di suatu tempat bernama Badr, Ummu Waraqah berkata kepada Nabi Saw. Katanya, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya berperang bersama Anda, saya nanti akan merawat dan mengobati orang saki dari tentara-tentara anda. Mudah-mudahan Allah Swt menganugerahi saya pahala orang yang mati syahid."

"Kamu tidak perlu ikut berperang, diamlah di rumah!," begitu jawab Nabi Saw. Karena Allah Swt akan menganugerahi kamu pahala orang yang mati syahid, Ummu Waraqah akhirnya yang akrab dipanggil Syahidah, yang berarti wanita yang mati syahid. Ia pernah minta izin dari Nabi Saw agar di rumahnya ada orang-orang yang selalu adzan, ia juga minta izin dari Nabi Saw untuk mengimami shalat jamaah di rumahnya, dan Nabi pun mengizinkannya. Kemudian ummu Waraqah menjadi imam shalat di rumahnya.

Itulah ahli-ahli Hadis yang meriwayatkan Hadis Ummu Waraqah, yang diizinkannya ia menjadi imam di rumahnya dengan ada makmum laki-lakinya. Tetapi dalam riwayat Abu Dawud ini, tidak ada keterangan bahwa Nabi Saw mengizinkan, apalagi menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam shalat berjamaah di rumahnya dengan makmum laki-laki. Hanya saja Imam Abu Dawud menulis riwayat lain dengan sanad yang lain pula, di mana Abd al-Rahman bin Khallad berkata, "Rasulullah Saw sering mengunjungi Ummu Waraqah di rumahnya, dan menunjuk seorang tukang adzan. Rasulullah juga menyuruh Ummu Waraqah untuk mengimami shalat jamaah bagi penghuni rumahnya."

Dari keterangan Abd al-Rahman bin khallad inilah ada ulama yang berkesimpulan bahwa orang-orang yang menjadi makmum itu adalah laki-laki dan perempuan, karena tukang adzannya seorang laki-

⁸³ Ali Musthofa Yaqub, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), Cet.1, hal. 20-22

laki, dan Ummu Waraqah juga punya budak laki-laki, dan mereka dianggap penghuni rumah semuanya.

Dalam riwayat-riwayat selain Abu Dawud juga tidak ada keterangan bahwa Ummu Waraqah mengimami makmum campuran antara laki-laki dan perempuan. Semua riwayat hanya menegaskan bahwa Nabi Saw mengizinkan Ummu Waraqah untuk mengimami penghuni rumahnya.⁸⁴

Dalam tafsir Ibnu Katsir “yang seharusnya mengurus kaum wanita adalah Laki-laki. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, sebagai hakim bagi mereka dan laki-laki, juga yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Ada ayat lain yang artinya, “Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain”, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari perempuan. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari perempuan dan lebih baik dari perempuan.”⁸⁵

Dalam Tafsir Al-Munir, yakni laki-laki itu berkuasa untuk kaum perempuan disebabkan Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas mereka kaum perempuan, yaitu dengan kesempurnaan akal, baik dalam mengurus, kuat dalam berpendapat dan mempunyai kekuatan yang lebih dalam beramal dan mengerjakan ketaatan. Oleh karena itu kaum laki-laki diberi kekhususan untuk mengemban kenabian, imamah, pemerintahan, atau perwakilan menyiarkan agama, menjadi saksi dalam peradilan diwajibkan melakukan jihad, salat jum’at dan sebagainya, juga disebabkan nafkah yang mereka keluarkan dari hartanya, mahar dan pembelanjanya.⁸⁶

Dalam tafsir Al-Azhar, memberikan jawaban. Sebab laki-laki itulah yang memimpin perempuan, bukan perempuan yang memimpin laki-laki, dan bukan pula sama kedudukan. Meskipun beristeri empat adalah satu kerepotan, tetapi umumnya laki-laki lebih dapat mengendalikan empat isteri, daripada misalnya seorang isteri bersuami empat orang. Terang dia, tidak akan dapat mengendalikan empat laki-laki itu. Malahan perempuan itulah yang akan sengsara jika misalnya dia diizinkan bersuami empat.

⁸⁴ M. Nasir Maidin, *Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)*. Dalam Jurnal: Al-Maiyyah, (Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2016), hal. 146-149

⁸⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim*, hal. 292

⁸⁶ Al-Allamah Asy-Syaihkh Muhammada Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, jilid, hal. 558-559

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin, Atau wahai perempuan, kamu mestimenerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidakpun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-laki lah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datanglah misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan bukan saja pada manusia bahkan pada binatang juga.⁸⁷

Melihat dari beberapa tafsir di atas, surah al-Nisa ayat 34 ini tidak ada kata-kata yang melarang wanita menjadi pemimpin. Yang ada hanya pemberitaan Allah Swt lelaki itu pemimpin bagi perempuan atau istri. Jadi dalam ayat ini tidak ada larangan perempuan menjadi pemimpin masyarakat.

Dalam ilmu balaghah atau Sastra Arab, dikenal ada dua macam kalimat, yaitu kalimat berita dan kalimat perintah. Kalimat berita disebut kalam *khobar*, sedangkan kalimat perintah disebut kalam *insya*. Menurut para ahli sastra Arab, kalam *khobar* lebih efektif dari pada kalam *insya*.

Sebagai contoh, anak yang belum mandi, apabila ia disuruh mandi dengan perintah (*kalam insya*), ayo cepat mandi, atau mandilah kamu!, maka ia tidak akan segera mandi, boleh jadi ia akan lari untuk bermain lagi. Namun, apabila anak itu disuruh mandi dengan kalimat berita (*kalam khobar*), misalnya, "Anak manis itu jika jam lima sore musti sudah mandi, maka ia akan segera lari untuk mengambil handuk", kemudian mandi. Inilah efektifitasnya sebuah kalimat berita dari kalimat perintah. Dan di dalam Al-Qur'an ungkapan seperti itu banyak sekali, terima kasih.⁸⁸

Kalau di tarik kesimpulan dari penjelasan dari tafsir-tafsir di atas, yakni pemimpin seharusnya laki-laki, dan lebih di sentralkan yang jadi pemimpin adalah laki-laki, tetapi tidak ada kata perintah pemimpin harus laki-laki. Ketika ada pemimpin perempuan bukan berarti yang laki-laki lemah, tetapi melihat konteks kondisi dan situasi dalam suatu daerah maupun kelompok lainnya.

⁸⁷Hamka, *Tafsir Al-Azhar, (Terjem)*, Jilid.2, hal. 1195-1196.

⁸⁸Ali Musthofa Yaqub, *Imam Perempuan*, hal. 22

4. Realisasi pemimpin Agama, Suku, Ras, dan Antar Golongan

Melihat fenomena yang terjadi di negara Indonesia ini pasti perlu adanya pembahasan mengenai politik identitas, karena segala cara untuk memenuhi tujuan identitas menjadi alat untuk mencapai tujuan. Misalnya agama, agama dipakai sebagai senjata, suku, etnis, dan ras juga dipakai sebagai cara atau alat untuk mencapai tujuan, tanpa adanya pertimbangan kiri kanan yang sekiranya mengganggu, tetapi apaun cara demi untuk mencapai tujuan semuanya ditempuh.

Dengan merendahkan agama, ras, suku satu dengan meninggikan agama, ras, suku yang lain menjadi cara untuk mencapai tujuan. Dengan harus mewujudkan negara “*Rahmatan Lil Alamin*” perlu adanya tindakan Islam ataupun pemerintah dalam menegaskan tolak rasisme, fanatisme etnis, dan diskriminasi yang berbasis kotor. Inilah dasar-dasar yang harus diperjuangkan dan harus ditegakkan tanpa harus melihat pilihan-pilihan politik praktis yang sedang terjadi di negara Indonesia ini. Jangan memakai cara untuk menjatuhkan lawan satu dengan yang lainnya demi untuk mencapai tujuan dengan cara adu domba ataupun menjelekkkan satu sama yang lain. Karena dengan cara seperti ini akan berbahaya bagi keutuhan dan kesatuan bangsa, dan pastinya juga akan merusak nama baik nilai-nilai luhur ajaran Islam di negri ini.⁸⁹

Dalam hal ini pastinya al-Qur’an akan ikut andil dalam meluruskan masalah-masalah yang terjadi dalam politik identitas ini. Disebutkan secara eksplisit keragaman etnis manusia dalam Al-Qur’an, Al-Qur’an juga menyebutkan perbedaan bangsa-bangsa dan suku-suku yang menunjukkan pengakuan terbuka Islam terhadap keragaman etnis dan budaya manusia. Allah Swt telah menegaskan kemuliaan dan keutamaan manusia secara umum, tidak pandang etnis, bahasa, budaya, dan agamanya. (Q.S. Al-Isro’, ayat 70)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Sungguh, telah Kami muliakan bani Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik,

⁸⁹Abdullah Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas Dalam Jurnal Studi Pemerintahan* (Vol.3 No.1 Februari 2012) hal.120

dan Kamiutamakan mereka melebihi sebagian besar makhluk yang Kami ciptakan. (Q.S. Al-Isra': 70).

Allah Swt menyebutkan tentang penghormatan-Nya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikan-Nya kepada mereka, bahwa Allah telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya.⁹⁰ Dengan bentuk atau rupa yang baik, tinggi yang sedang, dapat menguasai segala hal yang ada di bumi untuk kesenangannya, mempunyai kemampuan untuk berindustri, berilmu, berilmu, berbicara, makan dengan tangan dari makanan yang enak-enak yang berasal dari hewan, seperti daging, samin, dan air susu, ataupun yang berasal dari tumbuhan, seperti buah-buahan dan biji-bijian.⁹¹

Al-Qur'an juga mengisyaratkan tentang adanya keragaman etnis, bangsa, bahasa, dan budaya yang mana semuanya merupakan ketentuan Allah yang sudah tertulis dalam Al-Qur'an yang sudah tidak bisa ditolak dan untuk tujuan-tujuan tertentu. (Q.S. Ar-Rum: ayat 22).

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Dan di antara tanda-tanda (Kebesaran-)Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa-bahasa dan warna (kulit) kamu. Sungguh, dalam yang demikian itu ada bukti-bukti bagi orang yang mengetahui. (Q.S.Ar-Rum: 22).

Ayat ini menerangkan tentang tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah yang lain, yaitu penciptaan langit dan bumi sebagai peristiwa yang luar biasa besarnya, sangat teliti, dan cermat. Sesungguhnya galaksi-galaksi itu banyak jumlahnya di angkasa luas, dan masing-masing galaksi itu merupakan sistem peredaran yang paling teratur, mereka tidak pernah berantakan akibat bertabrakan antara yang satu dengan yang lain, atau antara planet-planet yang ada pada masing-masing galaksi itu. Semuanya itu berjalan menurut aturan yang telah ditentukan.

⁹⁰Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, hal. 97

⁹¹Muhammada Nawawi Al-Jawi (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid*, jilid , hal. 549-550

Setelah menyebutkan kebesaran Allah melalui penciptaan langit dan bumi, ayat di atas menyatakan adanya keanekaragaman bahasa dan warna kulit. Di sini Allah menyatakan bahwa Dia secara haq menjadikan manusia terdiri atas banyak ras yang kedudukannya sama di mata-Nya. Berbicara mengenai ras, Allah menjelaskannya melalui lidah atau lisan.⁹²

Semua penduduk bumi sejak Allah menciptakan Adam sampai hari kiamat, masing-masing mempunyai sepasang mata, sepasang alis, hidung, kelopak mata, mulut, pipi, dan seseorang dari mereka tidak serupa dengan yang lain. Tetapi masing-masing pasti mempunyai sesuatu ciri yang membedakan yang seorang dari yang lainnya, baik itu dalam hal rupa, bentuk, ataupun bahasa.

Perbedaan itu ada yang jelas dan ada yang samar, yang hanya diketahui setelah dilihat dengan teliti. Setiap wajah mereka mempunyai ciri khas dan rupa yang berbeda dengan yang lain. Tiada segolongan orang pun yang mempunyai ciri khas yang sama dalam hal ketampanan rupa atau keburukannya, melainkan pasti ada perbedaan di antara masing-masing orang.⁹³

Untuk saling mengenal keaneka-ragaman itu agar saling kenal satu sama lain. Yang berbeda atau yang sering dianggap asing dan aneh, dalam Al-Qur'an juga di jelaskan biar untuk saling mengenal bukan ditolak, apalagi dibenci. QS. Al-Hujurat: 13, Allah Swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

⁹² Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), hal. 1147-1149

⁹³ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, hal. 309

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikannya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan berbeda-beda warna kulit bukan untuk saling mencemoohkan, tetapi supaya saling mengenal dan menolong. Allah tidak menyukai orang-orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kepangkatan, atau kekayaannya karena yang paling mulia di antara manusia pada sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa kepada-Nya. Kebiasaan manusia selalu memandang harkat martabat itu selalu ada sangkut-pautnya dengan kebangsaan dan kekayaan. Padahal menurut pandangan Allah, orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa kepada-Nya.⁹⁴

Allah Swt, menceritakan kepada manusia bahwa Ia telah menciptakan mereka dari diri yang satu dan darinya Allah menciptakan istrinya, yaitu Adam dan Hawa, kemudian Ia menjadikan mereka berbangsa-bangsa. Pengertian bangsa dalam bahasa Arab adalah *sya'ibun* yang artinya lebih besar daripada kabilah, sesudah kabilah terdapat tingkatan-tingkatan lainnya yang lebih kecil seperti fasail.

Pada garis besarnya semua manusia bila ditinjau dari unsur kejadiannya yaitu tanah liat sampai dengan Adam dan Hawa. Sesungguhnya perbedaan keutamaan di antara mereka karena perkara agama, yaitu ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena itulah sesudah melarang perbuatan menggunjing dan menghina orang lain, Allah Swt berfirman mengingatkan mereka, bahwa mereka adalah manusia yang mempunyai martabat yang sama. Agar mereka saling mengenal di antara sesamanya, masing-masing dinisbatkan kepada suku atau bangsanya.⁹⁵

Kalau ditarik kesimpulan dari berbagai ayat dan tafsirnya di atas yakni, menjadikan identitas sebagai alat politik itu dibolehkan, namun dengan syarat-syarat diantaranya adalah: Tidak merugikan satu sama lain, maksudnya tidak saling sikut-menyikut, tidak saling menjatuhkan atau mengolok-olok, tidak boleh menggunakan dengan cara kekerasan (*Rasialisme*), membedakan golongan satu dengan yang lainnya, suku maupun ras (*Fanatisme etnis*). Tetapi tidak diperbolehkan, jika syarat-syarat di atas tidak di gunakan.

⁹⁴Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015), hal. 1789

⁹⁵Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, hal. 385

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan-pemaparan yang telah dikemukakan pada bab-bab yang telah terpapra di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Politik identitas merupakan suatu istilah yang muncul dalam suatu perkara yang menjadi jalan untuk mencapai tujuan, sehingga menjadi trending dalam berpolitik, yang menjadi tolak ukur suatu tujuan dalam mencapai tingkat keberhasilan.

Al-Qur'an tidak menyebutkan langsung istilah identitas, namun Al-Qur'an banyak mengisyaratkan tentang identitas, bahkan dalam isyarat-isyarat Al-Qur'an tersebut mengatur bagaimana beridentitas dengan baik, menggunakan identitas dengan baik, sehingga tidak menyalahi aturan dalam menggunakannya. Sebagaimana di jelaskan dalam ayat-ayat yang terpapar di atas.

Al-Qur'an tidak melarang seseorang beridentitas dalam mencapai tujuan (dalam berpolitik), bahkan Al-Qur'an membahas langsung mengenai pemimpin. Apakah pemimpin harus laki-laki atau perempuan, muslim atau non muslim, dan dari ras atau adatnya. Dalam Al-Qur'an tidak ada kata larangan untuk beridentitas, jadi disilahkan untuk beridentitas, asalkan sesuai norma-norma yang di jelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah terpapar di atas.

B. Saran

Penelitian ini tentu jauh dari kesempurnaan. Simpulan yang dihasilkan juga bisa diperdebatkan. Kritik, saran dan masukan akan sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian ini.

Penulis berharap ada kajian-kajian lanjutan yang mengulas tema ini dengan lebih komprehensif dan menggunakan pisau analisis yang lain, sehingga pertanyaan-pertanyaan seputar politik identitas bisa terjawab dan memuaskan lebih banyak orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Assyari, *Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212*. Dalam Jurnal: An-Nida (Edisi: Desember 2017, Vol. 41 No. 2)
- Al-Suyuti Jalaluddin, *Luba bal-Nuqul fi Asbab al-Nuzul*, terjemah: Tim Abdul Hayyie (Jakarta: Gema Insani, 2008)
- Abdillah Maskuri, *Membangun Masyarakat Qur'ani*, (Jakarta: Radians Presesi Media, 2007),
- Al-Burai, Muhammad, *Paradikma Politik Identitas Islam*, (Bandung: Mizan, 1986),
- Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Bairut: Dar Shadir, t.th),
- Azri, Muntah, *Masa Depan Kaum Wanita*, (Surabaya: Alfikr, 2008),Cet.ke-3
- Burhani Ahmad Najib, *Aksi Bela Isam: Konservatisme dan Fragmentasi Otoritas Keagamaan*. MAARIF (Vol. 14, No. 2. Desember 2016)
- Buchari Sri Astuti, *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2014)
- Budiardjo Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002)
- Brown, L. Carl, *Wajah Islam Politik, Pergulatan Agama dan Negara Sepanjang Sejarah Umat*, (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2003)
- Baqir asy-shadr, Sayid Muhammad, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)
- Berger, Peter, *Kebangkitan Agama Menantang Dunia Politik*. (Yogyakarta: Arruz 2003)
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,1993)
- Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), Cet. Ke-27
- Fawaid, Jazilul, *Bahasa Politik Al-Qur'an*, (Depok : Azza Media, 2012).
- Huntington Samuel, *Benturan antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (Yogyakarta: Qolam. 2007)
- Hossein, Seyyed, *Islam Tradisi*, (Bandung: PUSTAKA, 1994), Cet. I,
- Haramain, A. Malik, *Gus Dur Militer dan Poitik*. (Yogyakarta: LKiS, 2004), Cet. Ke-1.

- Hermawan Trinugraha, Yosafat, *Membaca Politik Identitas Anak Muda Minoritas*, Dalam Jurnal: *Setudi Pemuda* (Vol. 2, No. 2, September 2013)
- Husein, Muhammad, *Al- Hukuma al- Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1999)
- Haboddin, Muhtar, *Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal*, Dalam Jurnal: *Jurnal Studi Pemerintahan* (Vol.3 No.1 Februari 2012)
- Hussein Nasr, Sayyed, *Islam Tradisi Di Tengah Kanca Dunia Modern*, (Bandung: Pustaka, 1994)
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997)
- Katsir, Ibnu, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, (Kairo: Dar Al-Manar, 1999)
- Maarif Syafii, dkk, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme kita*. (Jakarta: Democracy Project. 2012)
- Mifdal Zusron Alfaqi, *Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas Serta Solidaritas*. Dalam Jurnal: *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* (Th. 28, No. 2, 2 Agustus 2015)
- Mahmasani, Shubhi, *Falsafah Al- Tasyri' Fi- Islam*, (Beirut: Dar al- Ilm li –al-malayin, 1988)
- Masdar, Umaruddin, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2008) Cet. 1
- Muhammad, Ahsin Sakho, *Keberkahan Al-Qur'an, Memahami Tema-Tema Penting Kehidupan dalam Terang Kitab Suci*, (t.tp, PT Qaf, 2017), Cet.1
- Maidin, M. Nasir, *Perempuan Menjadi Imam Shalat (Kajian Hukum dalam Perspektif Hadis)*. Dalam Jurnal: *Al-Maiyyah*, (Vol. 9 No. 1, Januari-Juni 2016),
- Nawawi Al- Jawi, Al-Allamah Asy-Syaihkh Muhammada (Banten), *Tafsir Al-Munir Marah Labid, jilid* , (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011)
- Oktarianti Desi, *Konsep Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Islam*. (Jakarta: Gramedia, 2005)
- Polanyi, *Segi Tak Terungkap Ilmu Pengetahuan*. (Jakarta: Gramedia, 1996)
- Prof. DR. Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1990), Jilid.1
- Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 2004)

- Rahman Fazlur, *Islam dalam Kata Pengantar*. (Mizan: 2017)
- Rahmat, Jalaluddin, *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)
- Rasyidi, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama, 2005)
- Rashid, Abdul, *Ilmu Politik Islam*, (Bandung: PUSTAKA, 2001)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, (Jakarta: At Tahiriyah, T Tp,) Cet, ke-1
- Rahman Andi, *Modus Sukses Kepemimpinan dalam Politik Islam: Sebuah Pendekatan Sejarah*, Dalam Jurnal *Mumtaz*, (Jakarta: Institut PTIQ, 2012), Vol.02, No.2
- Salim, Abdul Muin, *Fiqih Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Saradi, Wantona. *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: *Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Vol. 6, No. 1, April 2018),
- SMR Asep, *Pesan Al-Quran tentang Akhlak*. Dalam Jurnal: *Diya al-Afkar* (Vol. 5, No. 2, Desember 2017)
- Shaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966) Cet. III,
- Saradi, Wantona, *Politik Identitas dalam Dinamika Politik Lokal*, Dalam Jurnal: *Jurnal Sosiologi Pedesaan*,
- Sari, Endang, *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*, Dalam Jurnal: *Kritik Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* (Vo 2 No.1 Juni 2016)
- Sulaiman Schwart, Stephen, *Dua Wajah Islam, Moderatisme VS Fundamentalisme Dalam Wacana Global*, (t,tp, Blantika, 2007), Cet.1
- Sirin, Khaeron, *Rekonstruksi Pemikiran Dan Gerakan Perempuan*, Dalam Jurnal: *Pembangunan Masyarakat Qur'ani*, (Jakarta: Radians Presisi Media, 2007),
- Tuchman, Gaye, *komunikasi Politik*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998)
- Taimiyah, Ibnu, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah Fi Ishlahi Ar-Ra'I Wa Arra'iyah*, (Kairo: Maktabah Ar-Risalah, t.th.)
- Yaqub, Ali Musthofa, *Imam Perempuan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), Cet.1,
- Zuhri, Saifuddin, *KH. Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri NU*, (Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) 2004).

Tim Penulis, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdikbud, 2008),
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Perca, 1985)
Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, *Tafsir Ringkas*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015)
Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)